


KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

12 JUNI 2024


-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	TINGKATKAN PENGETAHUAN PETANI TERKAIT IKLIM	
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Antara/Igoy El Fitra	



TINGKATKAN PENGETAHUAN PETANI TERKAIT IKLIM |
 Peserta Sekolah Lapang Iklim (SLI) Operasional menanam bibit padi saat pembukaan kegiatan tersebut di Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Selasa (11/6). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumbar bekerja sama dengan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Sumbar membuka SLI Operasional untuk meningkatkan pengetahuan para petani terkait iklim serta guna meningkatkan produksi pertanian.

ANTARA/IGGOY EL FITRA


Title	Tingkatkan Produksi	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Antara/Basri Marzuki	

» Meningkatkan Produksi



ANTARA-BASRI MARZUKI

» Petani memupuk tanaman padinya di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (10/6). Kementerian Pertanian menambah alokasi pupuk subsidi di Sulteng sebanyak 128.057 ton dari sebelumnya 61.816 ton atas permintaan petani yang mencakup pupuk urea, NPK, dan KPK Formula untuk meningkatkan produksi dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional.

Title	Kaum Migran Terdeportasi Diberi Pelatihan	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Ant/G-1	

Pemberdayaan SDM

Kaum Migran Terdeportasi Diberi Pelatihan

JAKARTA - Agar tidak menganggur setelah diusir dari Malaysia, para migran diberi pelatihan selama berada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur.

Mereka akan dilatih agar bisa usaha dan bekerja di Indonesia karena perjanjiannya selama lima tahun mereka ini di-black list. "Mereka tak boleh ke sana Malaysia," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat audiensi dengan para pekerja migran di RPTC Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa.

Para migran bermasalah itu dipulangkan sebagai hasil program repatriasi atau pemulangan pekerja migran ilegal yang dilakukan Kementerian Luar Negeri. Mereka umumnya ada-

lah pekerja migran ilegal, visanya habis dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Jumlah pekerja migran yang dipulangkan dari Malaysia sebanyak 216 orang. Namun yang dibawa ke RPTC Bambu Apus ini ada 109 orang. Mereka dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Mereka akan kita ajari berbagai pelatihan dan keterampilan supaya nantinya bisa bekerja atau buka usaha. Karena mereka ini kan masuk black list Pemerintah Malaysia, selama lima tahun tidak boleh masuk ke sana," ujarnya. Risma berharap dengan pelatihan mereka bisa mencari nafkah di tanah air dan tidak perlu kembali lagi ke Malaysia. Apalagi masuk secara ilegal.

Hal itu lantaran banyak pekerja migran ilegal yang pernah mendapat pelatihan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mereka tak ingin kembali lagi ke Malaysia. Nantinya mereka kita bantu untuk buka usaha dengan memberikan alat kerja, bukan uang. Sebab uang kotornya itu modal. Misalnya dia mau buka usaha catering, ya kita bantu dengan peralatan masak dan bahan-bahannya

Mensos tidak memberikan batas waktu kepada para pekerja migran untuk berada di rumah perlindungan. "Selama mereka belum siap keluar, boleh tetap di sini," jelasnya. Di sini mereka diberikan pelatihan. Macam-macam jenisnya tergantung keinginan mereka, kalau mekanik disiapkan alat perbengkelan, kalau pertanian

disiapkan alat pertanian.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos Rachmat K mengatakan, repatriasi atau pemulangan warga negara Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenu) melalui KBRI Kuala Lumpur. "Ini memang diserahkan untuk ditindaklanjuti dengan pelatihan, pemulangan ke tempat tinggalnya dan pemberdayaannya," kata dia.


Saat ini, kata Rachmat, seratusan pekerja migran itu akan menjalani asesmen awal oleh petugas karena baru Senin malam (10/6) sampai di RPTC Bambu Apus. "Asesmen itu untuk mengetahui informasi terkait kebutuhan mereka, kewilayahannya seperti apa yang diinginkannya," kata dia.

Sementara itu, pekerja migran dari Banyuwangi, Jawa Timur, Keisya mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh pihak Imigrasi Malaysia karena visanya sudah habis. "Awalnya saya berangkat ke Malaysia secara resmi atau legal. Namun, karena majikannya memperlakukan saya dengan tidak baik, maka saya kabur. Selama hampir 4,5 tahun kerja sendiri dan visa saya telah habis," tuturnya.

Dia berharap selama ditampung di RPTC Bambu Apus mendapatkan pelatihan dan permodalan dari Kemensos. Inginnya pulang, tapi kalau diberikan pelatihan dan permodalan dia mau usaha. "Saya ingin buka salon karena sudah pernah ikut kursus salon," ujar Keisya. ■ **Ant/G-1**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Padang Paparkan Strategi Cegah Alih Fungsi Pertanian Jadi Permukiman	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	YK/N-3	

Strategi Pembangunan

Padang Paparkan Strategi Cegah Alih Fungsi Pertanian Jadi Permukiman

PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), memaparkan sejumlah strategi dalam upaya mencegah alih fungsi areal pertanian menjadi permukiman warga yang dapat mempengaruhi produksi gabah.

“Pertama, untuk mengatasi alih fungsi lahan maka kami harus menjejahterakan petani dulu,” kata Penjabat Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, di Padang, Selasa (11/6).

Hal itu disampaikan Penjabat Wali Kota Padang di sela-sela tanam perdana dan pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Operasional 2024 pada kelompok tani Raperta, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Seperti dikutip dari *Antara*, Andree mengatakan dengan menjejahterakan petani maka setiap petani akan berpikir ulang menjual tanahnya kepada pihak pengembang perumahan. Kemudian jika petani sejahtera, otomatis juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kemudian, strategi selanjutnya yakni menurunkan harga pupuk atau harga yang terjangkau bagi setiap petani, termasuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan pupuk.

Sawah Dilindungi

Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan areal sawah dilindungi yang peruntukannya tidak boleh diganggu se-

lain untuk padi. Pemangku kepentingan juga menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Dengan menerbitkan RTRW ini, Kota Padang sudah memetakan daerah mana saja yang tidak boleh dijadikan perumahan,” kata dia.

Dari sejumlah strategi itu, Andree lebih cenderung menguatkan peningkatan kesejahteraan petani. Alasannya, pemerintah daerah menyakini petani tidak akan menjual tanahnya apabila sudah sejahtera dari hasil pertaniannya.


Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau dan mengajak generasi Z untuk berani berprofesi sebagai petani mo-

dem atau tidak hanya fokus pada satu bidang pekerjaan saja.

Menurutnya, jika generasi Z di Kota Padang serius menjadi petani modern maka bisa menghasilkan pemasukan yang tergolong besar. Andree mencontohkan keberhasilan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang sukses menjadi seorang petani.

“Petani ini adalah profesi yang mulia sehingga generasi Z perlu didorong,” kata dia.

Terkait masalah lahan sawah ini, Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster, mengatakan alih fungsi lahan, terutama sawah untuk pembangunan pariwisata harus dikendalikan ke depannya. ■ YK/N-3

Title	ANTISIPASI WABAH PMK	
Date	12 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	Antara/Umarul Faruq	


■ ANTISIPASI WABAH PMK



Antara/Umarul Faruq

Tim vaksinator menyemprotkan disinfektan pada hewan kurban di Kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (11/6). menyemprotkan disinfektan itu

untuk menjaga kesehatan hewan dan mencegah terjadinya wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) menjelang hari raya kurban.

Title	ARAL BESAR MENGADANG EKONOMI RIIL	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Annasa R. Kamalina, Maria Elena & Tegar Arief	

| EKSPEKTASI HARGA & INFLASI |

ARAL BESAR MENGADANG EKONOMI RIIL

Kekhawatiran soal kembali melesatnya pergerakan harga barang kembali mencuat. Setelah pergerakan Indeks Harga Perdagangan Besar yang menyentuh level tertinggi, kini giliran sektor riil yang kelimpungan dalam menjaga stabilitas produksi, sehingga ekspektasi kenaikan harga pun menguap.

Annasa R. Kamalina, Maria Elena, & Tegar Arief
redaksi@bisnis.com

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Mei 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI) kemarin, Selasa (11/6), tekanan inflasi dan kenaikan harga umum pada Juli 2024 dan Oktober 2024 menguat.

Hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum atau IEH Juli 2024 dan Oktober 2024 yang masing-masing mencapai 142,5 dan 142,0, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 140,1 dan 134,5.

Data yang dipublikasikan oleh bank sentral itu relatif selaras dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang pada pekan lalu mencatat adanya kenaikan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Pada Mei 2024, IHPB berada pada posisi 119,6 relatif tidak berubah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi dalam satu tahun terakhir. (Lihat infografik)

IHPB merupakan indikator utama yang berada pada level perdagangan besar atau grosir. Adapun, cakupan IHPB antara lain sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta industri atau manufaktur.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi naiknya IHPB. Misalnya faktor musim panen, permintaan pada periode tertentu, pergerakan harga komoditas, hingga pelemahan rupiah yang memacu harga di tingkat produsen.

Faktor terakhir menjadi peneakan utama dunia usaha, sehingga memengaruhi IHPB. Maklum, mayoritas bahan baku dan penolong industri pengolahan atau manufaktur masih diimpor dan ditransaksikan dengan dolar Amerika Serikat (AS).

Dengan demikian, pelemahan rupiah akan membebani biaya produksi yang kemudian mengalir ke naiknya IHPB hingga Indeks Harga Konsumen (IHK), serta bermuara ke lonjakan inflasi. Puncaknya, aneka faktor itu akan mengontrol harga barang.

"Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Juli dan Oktober 2024 diprakirakan meningkat," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, kemarin.

Jika dicermati lebih dalam, bayang-bayang kembali tingginya inflasi bukan angan semu belaka. Sebab dalam laporan tersebut, BI juga memperkirakan adanya peningkatan penjualan pada Juli 2024 dan Oktober 2024.

Secara berturut-turut, Indeks Ekspektasi Penjualan atau IEP pada kedua bulan itu masing-masing sebesar 137,2 dan 143,7, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 127,5 dan 140,4.

Data tersebut bisa dimaknai bahwa daya beli masyarakat relatif tangguh lantaran masih mampu melakukan

konsumsi, kendati ekspektasi kenaikan harga cukup tinggi.

Sepintas situasi ini memang cukup positif untuk memotret daya beli dan konsumsi rumah tangga di Tanah Air. Akan tetapi, jika tak dikelola dengan baik, situasi yang tecermin dari data itu bisa memicu kenaikan inflasi.

Kalangan ekonom pun memandang dengan pesimis soal prospek konsumsi ke depan apabila kondisi ekonomi selaras dengan survei bank sentral tersebut.

Sebab apabila kenaikan inflasi bergerak liar, maka akan berimbas pada tertekannya daya beli masyarakat lantaran energi untuk konsumsi telah habis terkuras untuk membeli barang ketika harga lebih mahal.

DUNIA USAHA

Situasi ini pun akan berimbas ke dunia usaha yang amat mengandalkan kemampuan konsumsi masyarakat dalam menjalankan operasional bisnis.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilef memprediksi dunia usaha relatif sulit berharap akan ada dorongan konsumsi yang relatif besar, terutama pada beberapa bulan mendatang.

Harapan yang kemudian ada masih dilakukannya ada pada akhir tahun ketika ada momentum Natal dan libur Tahun Baru 2025. Di luar itu, belum



Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Juli dan Oktober 2024 diprakirakan meningkat.

ada dorongan untuk meningkatkan konsumsi, dan hal ini akan menghambat ekspansi bisnis.

"Dugaan saya setelah Mei sampai dengan Oktober atau November ekspansi usaha tidak akan relatif besar. Apalagi jika dibandingkan dengan awal tahun atau di dua kuartal awal 2024," katanya kepada *Bisnis*.

Faktor lain yang menjadi aral adalah arah kebijakan pemerintah yang kurang fleksibel, terutama dalam menyusun insentif kebijakan karena adanya proses transisi.

Sebaliknya, kebijakan ramah insentif baru akan dieksekusi oleh pemerintahan baru yang

mulai menjabat pada Oktober mendatang.

Hal yang kemudian perlu diantisipasi adalah keberhasilan pemerintah dalam menjaga tren inflasi untuk berada di kisaran target yang ingin dicapai.

Selain itu, stabilitas harga juga akan dipengaruhi oleh keputusan soal bahan bakar minyak (BBM) ataupun tarif listrik.

"Ini perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, karena akan menentukan ekspansi atau tidak dalam merespons permintaan konsumen," ujarnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dalam kondisi konsumen cenderung menahan belanja, maka berpotensi memengaruhi kinerja penjualan dari sisi lapangan usaha.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu fokus dalam upaya menjaga agar biaya hidup tidak meningkat signifikan, sekaligus menjamin stabilitas pendapatan nominal masyarakat.

Solusinya adalah pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang berpotensi mendorong peningkatan pendapatan riil masyarakat, serta mendorong penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

"Dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat, maka daya beli konsumen akan meningkat, yang pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang solid," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam melakukan penyesuaian harga-harga barang atau jasa yang diatur oleh pemangku kebijakan.

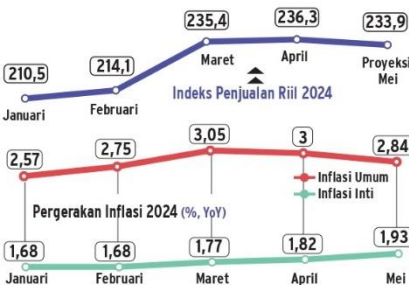
Misalnya terkait dengan harga BBM, harga gas *liquefied petroleum gas* (LPG) bersubsidi, dan tarif listrik. Termasuk rencana penyesuaian tarif cukai plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang akan menambah biaya hidup masyarakat. ☐



pada akhir tahun ketika ada momentum Natal dan libur Tahun Baru 2025. Di luar itu, belum

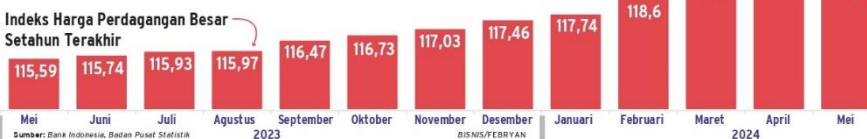



Ekspektasi harga kembali menjadi momok yang patut diwaspadai lantaran menggambarkan adanya gangguan dari sisi produksi.



Indeks Ekspektasi Harga dan Penjualan 2024

Varibel	Januari	Februari	Maret	April
Ekspektasi Penjualan				
3 Bulan Mendatang	161,0	147,8	127,5	131,2
6 Bulan Mendatang	144,4	164,9	140,4	143,7
Ekspektasi Harga Umum				
3 Bulan Mendatang	166,9	146,1	140,1	142,5
6 Bulan Mendatang	146,7	136,9	134,5	142,0



Title	PEMERINTAH SERIUS AKUISISI PERUSAHAAN BERAS KAMBOJA	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Dwi Racmawati & Nil Luh Anggela	

| PEMENUHAN STOK PANGAN |

PEMERINTAH SERIUS AKUISISI PERUSAHAAN BERAS KAMBOJA

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah serius mendorong Perusahaan Umum Bulog mengakuisisi perusahaan penghasil beras di Kamboja untuk memberikan kepastian stok cadangan pangan di Tanah Air.

Dwi Racmawati & Nil Luh Anggela
redaksi@bisnis.com

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah kini melakukan kajian mendalam terkait dengan rencana akuisisi perusahaan di Kamboja dalam mengantisipasi kekurangan stok beras.

"Ada koordinasi [rencana akuisisi]. Nanti kita lihat. Nanti kami diskusi secara detail," ujarnya sesuai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (11/6).

Rencana akuisisi tersebut merupakan instruksi langsung Jokowi sebagai antisipasi gejala harga pangan sebagai imbas El Nino yang disampaikan sesuai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (10/6).

Saat itu, Kepala Negara menegaskan proses bisnis yang dilakukan oleh Perum Bulog bisa memberikan kepastian stok cadangan beras pemerintah. Selama ini, Bulog melakukan impor beras ke sejumlah negara salah satunya Kamboja guna mencukupi stok di dalam negeri. "Dari pada beli, ya lebih bagus investasi," kata Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest) Luhut Binsar Pangandian menambahkan rencana akuisisi Perum Bulog ke Kamboja sebagai bentuk kewaspadaan tren

global soal ketahanan pangan.

Dari Indramayu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan siap mempelajari lebih lanjut mengenai rencana tersebut agar Indonesia dapat memiliki cadangan pangan di luar negeri. "Kalau idenya memang demikian ya kita akan peajari supaya kita juga punya cadangan pangan," kata Arief.

Menurutnya, ide yang dicanangkan Jokowi termasuk baik lantaran dapat membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, jika produksi dalam negeri tak mencukupi.

Arief yang juga menjabat Dewan Pengawas Perum Bulog menegaskan langkah akuisisi merupakan salah satu antisipasi pemerintah jika pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi beras dalam negeri.

Akan tetapi, Arief menegaskan pemerintah tetap mengutamakan produksi dalam negeri jika penugasan tersebut dilaksanakan oleh Bulog. "Memang nomor satu yang kita dorong adalah produksi dalam negeri," ujarnya.

Arief juga mengungkapkan risiko kekurangan produksi beras pada 2024 hingga 5 juta ton seiring dengan potensi anjaknya produksi beras pada semester II/2024.

Pada Januari—Juli 2024, dia

memprediksikan defisit produksi beras sebesar 2,6 juta ton.

"Kalau diskusi saya dengan Pak Menteri Pertanian memproyeksikan sekitar 5 juta ton [kekurangan produksi beras]. Dilihat dari grafik dan *pattern* di semester kedua memang agak berat produksinya," ujar Arief.

Dia belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor tahun ini. Adapun, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Arief menegaskan masih mengupayakan pemenuhan keuangan beras tersebut dari dalam negeri. Menurutnya, sederet upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian seperti penambahan alokasi pupuk bersubsidi, program pompanisasi hingga perluasan area tanaman.

Di sisi lain, Arief menegaskan bahwa untuk mengimpor beras juga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu ada upaya khusus untuk melakukan pengadaan beras dari luar negeri, mulai dari mencari pasokan, hingga mempertimbangkan gejala nilai tukar rupiah.

"Sekarang saja dari 3,6 juta ton [kuota impor], kita masih pelan-pelan, baru 2 juta [ton]. Nanti kalau diperlukan, tapi kita usahakan dalam negeri. Sayang 3 juta [ton] impor itu Rp30 triliun [mengalir ke petani luar negeri]," ucapnya.

Arief juga mengungkapkan anggaran

“

Ketika kita punya cadangan sendiri di luar [negeri] melalui kerja sama dengan negara yang bersangkutan, kan lebih aman.

program bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM apda 2025 mencapai Rp3 triliun per bulan dengan penyaluran 220.000 ton beras. Artinya, untuk menjalankan program bantuan pangan beras selama 6 bulan pada 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 triliun.

PEREBUTAN BERAS

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa berpendapat akuisisi Perum Bulog ke perusahaan internasional bisa membantu mengamankan stok beras dalam negeri jika harga beras dunia melonjak.

Dengan langkah itu, dia menilai Indonesia tidak akan terdampak dari tingginya harga beras dunia. Saat ini, beras yang diperdagangkan di dunia hanya sekitar 10%

atau setara 50 juta ton, sedangkan banyak negara yang juga membutuhkan beras.

"Ketika kita punya cadangan sendiri di luar [negeri] melalui kerja sama dengan negara yang bersangkutan, kan lebih aman," ungkapnya.

Andreas mengharapkan skema akuisisi tidak hanya diterapkan untuk komoditas beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya seperti sapi hidup di Australia dan Selandia Baru.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton pada tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan.

Untuk pengadaan beras impor, dia tidak bisa menerapkan sistem hedging harga dengan para pemasok. Namun, dia memastikan telah menjalin komitmen untuk pengadaan beras impor melalui kontrak dengan pihak di negara sumber impor apabila sewaktu-waktu beras diperlukan. "Harga market, saya *enggak* bisa hedging aturannya *enggak* boleh."

Panel harga pangan Bapanas pada Senin (10/6) mencatat harga beras premium turun 0,65% daripada sehari lalu menjadi Rp15.330 per kg, sedangkan beras medium turun 1,04% jadi Rp13.260 per kg. (Akbar Evandio) E

Rencana pemerintah melanjutkan bantuan sosial pangan berupa beras pada 2025 membawa konsekuensi lanjutan berupa besarnya volume impor beras pada tahun depan.

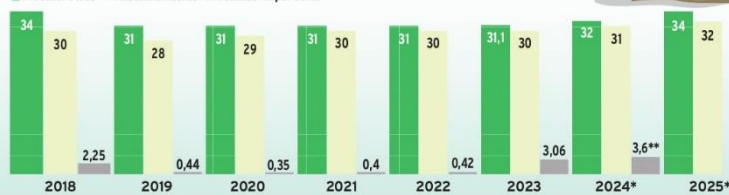
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Per 5 Juni 2024

Kategori	HPP (Rp/kg)	Keterangan
GKP petani	6.000	Kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%
GKP penggilingan	6.100	Kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%
GKG penggilingan	7.300	Kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%
GKG gudang	7.400	Kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%
Beras gudang Bulog	11.000	Derajat sosooh min. 95%, kadar air mak. 14%, butir patah mak. 20%, butir menir mak. 2%

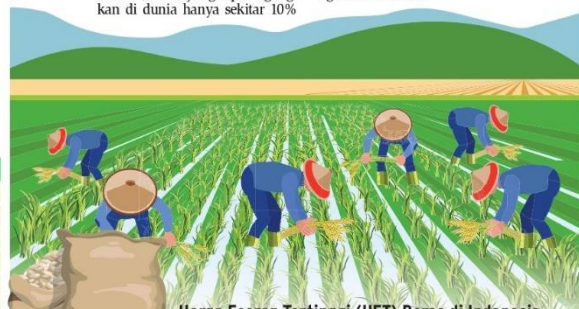
Ket: GKG: gabah kering giling, GKP: gabah kering panen

Produksi, Kebutuhan dan Realisasi Impor Beras 2018-2025 (juta ton)

■ Produksi beras ■ Kebutuhan beras ■ Realisasi impor beras




Sumber: Perbasan No.5/2024, Perbasan No.4/2024, Kemantan diolah dari BPS, 2023



Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di Indonesia per 5 Juni 2024 (Rp/kg)

Wilayah	Beras	
	Medium	Premium
Jawa, Lampung, dan Sumsel	12.500	14.900
Aceh, Sumatra non-Lampung dan Sumsel	13.100	15.400
Bali dan NTB	12.500	14.900
NTT	13.100	15.400
Sulawesi	12.500	14.900
Kalimantan	13.100	15.400
Maluku	13.500	15.800
Papua	13.500	15.800

BISNIS/RADITYA EKO

Title	Bapanas Klaim Stok Pangan Terkendali	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	NOV	

Jelang Idul Adha

Bapanas Klaim Stok Pangan Terkendali

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2024 aman dan terkendali.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, berdasarkan proyeksi neraca pangan, Bapanas telah menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan. Secara umum, stok pangan pokok strategis nasional dipastikan aman dan cukup.

“Stok pangan ini sangat mencukupi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat momentum Idul Adha yang sebentar lagi tiba,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Arief mengatakan, pihaknya

juga sudah melaporkan kondisi stok pangan ini kepada Komisi IV DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (10/6/2024).

Dia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Bapanas untuk mengamankan stok pangan, yakni memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog selalu terjaga di atas 1 juta ton.

Berdasarkan data Bapanas per 7 Juni 2024, stok CBP di Bulog sebesar 1,7 juta ton. Kondisi ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta jajarannya memastikan terjaminnya stabilitas pangan dan terdistribusi secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Bapanas juga melakukan beberapa langkah strategis pengamanan pasokan dan harga pangan dengan mengencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah.

“Per 7 Juni 2024, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.036 kali di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi,” jelas Arief.

Selain itu, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menjadi kepedulian utama untuk menghadirkan beras yang terjangkau bagi masyarakat.

Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP oleh Bulog mencapai 755 ribu ton yang tersebar di pasar

tradisional maupun ritel modern.

Jelang Idul Adha, Bapanas juga memastikan ketersediaan daging konsumsi, cukup untuk masyarakat.

Untuk sapi hidup (*livestock*), kata Arief, Bapanas akan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama para *stakeholder* guna mengidentifikasi jumlah sebenarnya, sehingga upaya Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dapat dilakukan dengan baik.

“Saat hari raya pastinya kebutuhan untuk kurban akan meningkat. Karena itu, akan kami rapatkan bersama para Deputi. Namun khusus daging sapi dan kerbau, kami pastikan kondisi

sinya aman,” ujar Arief.


Menurutnya, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi tantangan distribusi sapi dan kerbau hidup jelang hari raya adalah perpindahan antarwilayah.

Untuk Jakarta dan Bandung Raya, Bapanas biasanya menyuplai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka juga mendatangkan stok dari daerah Nusa Tenggara yang kerap mengakibatkan stok terlalu banyak.

“Jadi, isunya malah kebanyakan dan itu akhirnya akan ‘direeksport’. Tetapi pada waktu itu diupayakan untuk dijual di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Arief. ■ NOV

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Pemerintah Kudu Gercep Antisipasi	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	5	
Author	OSP	

Waspada Penurunan Produksi Pemerintah Kudu Gercep Antisipasi

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan adanya potensi penurunan produksi beras nasional pada Januari-Juli 2024. Penurunan produksi ini berpotensi mengerek harga dan kelangkaan beras di pasaran, sehingga Pemerintah perlu bergerak cepat (gercep) membuat sejumlah langkah antisipasi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menerangkan, berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) hasil amatan pada April 2024, proyeksi total produksi beras Januari-Juli 2024 sebesar 18,64 juta ton.

Menurut dia, jumlah tersebut lebih rendah 2,47 juta ton dibanding periode yang sama di tahun 2023.

"Neraca konsumsi periode Januari-Juli 2024, sedikit mengalami surplus 0,65 juta ton. Hal itu menjadi *concern* kami untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya, karena memasuki musim kemarau," ujar Arief di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurutnya, tren produksi periode Januari-Juli 2024, menjadi pertanda produksi beras di akhir tahun ini akan anjlok. Arief pun mengakui adanya risiko kenaikan harga beras, dan hal itu diprediksi terjadi dalam 2-3 bulan ke depan.

"Di semester II produksi pasti di bawah. Jadi, akan ada perebutan gabah dan memicu harga naik di akhir tahun," cetusnya.

Bahkan, sambung dia, harga beras mungkin melonjak hingga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang baru ditetapkan Bapanas.

Diketahui, Bapanas menerbitkan HET beras yang baru per Juni 2024. HET untuk beras premium sebesar Rp 14.900-Rp 15.800 per kilogram dan beras medium sebesar Rp 12.500-Rp 13.500 per kilogram.

Namun begitu, Arief mengklaim, kondisi stok pangan nasional dalam kondisi yang aman dan terkendali menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2024.

"Ada El Nino, La Nina atau apapun itu, Bapanas harus memastikan stok pangan dalam kondisi aman dan cukup," tandasnya.

Sementara, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, keputusan Bapanas melakukan penyesuaian HET beras dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras beberapa waktu lalu, kurang tepat. Sebab, musim panen utama sudah berlalu, dan

sesaat lagi petani akan memasuki musim panen kedua atau gadu.

"Jelang akhir tahun nanti, panen ketiga atau paceklik. Biasanya, jumlah gabah yang dipanen di musim tanam kedua dan ketiga lebih sedikit, dan harga gabah cenderung lebih tinggi. Dalam konteks ini, keputusan Bapanas (menaikan HET dan HPP) tidak efektif dalam melindungi petani," tuturnya.

Sementara itu, sambung dia, produsen besar dan pedagang besar mendapatkan manfaat dari situasi ini. Tapi, produsen kecil dirugikan, karena terpaksa menjual gabah dengan harga rendah selama musim panen utama.

"Ketidakeimbangan dalam rantai pasok pangan ini, dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara produsen besar dan produsen kecil," tegasnya.

Di media sosial X, netizen berharap pemerintah memiliki solusi dan mengantisipasi dampak menurunnya produksi beras.

Akun *@Mi731hel* berharap, pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan embung yang tengah disebut Pemerintah mampu meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Akun *@ballambinlove* mengingatkan, produksi beras yang terus menurun harus disikapi serius. Terlebih, kondisi serupa juga dialami negara-negara produsen beras lainnya. "Andai Vietnam, Thailand dan India tak mau jual beras ke Indonesia, harga beras lokal bisa meroket, dan bakal akan ada kelaparan gara-gara produksi lokal tidak mencukupi," cuitnya.

Sementara, akun *@pri-mustrlw* mengusulkan, angka konsumsi beras se-Indonesia dipublikasikan secara luas untuk mengetahui kebutuhan pasokan beras dalam negeri.

"Sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang, yang diungkap cuma total produksi dan total impor. Tapi, Pemerintah nggak pernah buka berapa konsumsi beras se-Indonesia tiap bulannya. Jadi, jangan heran pas panen raya malah ada impor beras," pintannya.


Akun *@hanafriamli* menegaskan, perlu ada strategi khusus untuk mengantisipasi penurunan produksi beras dalam negeri.

"Cuaca panas telah berdampak pada sawah-sawah di Indonesia yang bergantung pada air. Ini berpotensi memicu rekor harga dan gagal panen di salah satu produsen beras terbesar di dunia. Harusnya, ini bisa diantisipasi sejak lama," cetusnya. ■ OSP

Title	TANAM PADI	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	6	
Author	Rakyat Merdeka	



TANAM PADI: Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar (kiri) menanam bibit padi bersama Kepala Stasiun Klimatologi Sumbar, Heron Tarigan (tengah) dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Padang Panjang Suaidi Ahadi (kanan) saat tanam perdana pembukaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Operasional di Batu Gadang, Lubuk Kilangan Padang, Sumatera Barat, Selasa (11/6/2024). Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan para petani terkait iklim serta meningkatkan produksi pertanian.

Title	Harga Pangan Pokok Masih Stabil	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Jawa Pos	
Page	10	
Author	Mim/col/ind	



PEMKOT TANGERANG UNTUK JAWA POS

AMAN: Penjual ayam di pasar tradisional tetap memiliki stok jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H.

Harga Pangan Pokok Masih Stabil

KOTA TANGERANG - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, Pemkot Tangerang terus memonitor harga kebutuhan pangan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Tangerang. Saat ini, dipastikan harga kebutuhan pokok masih terpantau stabil.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil, Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang Suli Rosadi menuturkan, pihaknya telah memonitor perkembangan harga kebutuhan pangan pokok secara rutin.

Hasilnya, perkembangan harga dinilai masih dalam kategori stabil seperti beras premium (Rp 14 ribu/kg), gula pasir (Rp 18 ribu- Rp 19

ribu/kg), minyak goreng kemasan (Rp 15 ribu- Rp 16 ribu/liter), daging ayam broiler (Rp 40 ribu- Rp 45 ribu/kg), daging sapi (Rp 140 ribu/kg), serta sedikit kenaikan di cabai merah keriting (Rp 50 ribu- Rp 70 ribu/kg).

"Kami telah melakukan pemantauan (monitoring) intensif serta terus berkoordinasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang tetap terkendali," tuturnya kemarin (11/6).

Dia menyampaikan, pihaknya juga akan terus melakukan monitoring di sejumlah pasar tradisional di Kota Tangerang. Misalnya, Pasar Anyar, Pasar

Malabar, Pasar Laris, Pasar Ramadhani, Pasar Poris, Pasar Babakan, Pasar Batako, Pasar Sipon, dan Pasar Plaza Ciledug Baru.

Dia pun mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga pangan pokok dengan tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan. Sebab, itu dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga barang tersebut.

"Kami berharap, dengan adanya stabilitas harga ini, masyarakat dapat merayakan Idul Adha pekan depan dengan tenang tanpa khawatir adanya lonjakan harga pangan yang drastis," tuturnya. **(mim/col/ind)**

Title	Acuan Harga Gabah Belum Jangkau Petani	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	2	
Author	JOG/FRD/VAN/MEL/ILO	

Acuan Harga Gabah Belum Jangkau Petani

Penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen sebesar Rp 6.000 per kilogram belum dinikmati semua petani. Masih ada petani yang tak tahu sehingga mereka menjual gabah di bawah acuan harga dari pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS—Penelusuran *Kompas* menemukan, instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga gabah maupun beras di tingkat petani belum berjalan efektif. Sebagian petani belum tahu ketentuan harga pembelian pemerintah gabah kering panen Rp 6.000 per kilogram per awal April 2024. Badan Pusat Statistik mencatat, masih ada kasus pembelian gabah petani di bawah harga acuan pemerintah.

Harga pembelian pemerintah (HPP) tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Surat itu berisi ketetapan HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.000 per kg. Adapun HPP untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg menjadi Rp 7.400 per kg. Aturan ini berlaku per 3 April sampai 30 Juni 2024.

Sebelum surat keputusan itu berakhir, Bapanas menetapkan HPP gabah kering panen Rp 6.000 per kg untuk diberlakukan seterusnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kendati demikian, masih banyak petani yang belum tahu. Maksud rafaksi di sini adalah pengurangan harga beli gabah ataupun beras petani yang memiliki kualitas di bawah standar mutu pemerintah.

Tugiyono (56), petani di Kelurahan Tawang Sari Kapanehon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, terkejut HPP untuk GKP senilai Rp 6.000 per kg (selama memenuhi syarat mutu). Pada pertengahan Mei 2024, di Tawang Sari, harga pasaran GKP yang dipanen secara manual Rp 4.500 per kg.

"Kalau harga beras saya tahu Rp 12.000 dari TV (televisi). Kalau harga gabah, di TV tidak

disebutkan," ucap petani dengan 5.000-an meter persegi sawah itu. Pemerintah melalui Bapanas menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras. Di Pulau Jawa, beras medium sekarang bisa dijual hingga Rp 12.500 per kg, sebelumnya harganya maksimal Rp 10.900 per kg.

Harga pasaran GKP sebesar Rp 4.000-Rp 4.500 per kg di Tawang Sari, menurut petani lain, Rubino, hanya mengembalikan modal operasional bertani dan belum dapat laba. Adapun Rp 6.000 per kg di daerah itu merupakan harga pasaran GKG di tingkat petani. Padahal, di SK Bapanas No 167/2024, nilai HPP untuk GKP sudah mencapai Rp 6.000 per kg.

Petani di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Masli (63), bahkan tidak tahu jika di Pandeglang ada gudang Bulog.

Dengan harga pasaran GKP di Desa Citeureup yang sekitar Rp 5.000 per kg, Masli yang mengelola total 2 hektar sawah memperkirakan dirinya masih bisa mendapat untung. Ia juga yakin standar mutu GKP dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa 10 persen bisa dipenuhi, dengan mengacu pada hasil panen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Mei 2024, secara nasional terdapat 11,89 persen harga GKP di bawah HPP dari 159 titik observasi. Kasus itu naik dibandingkan dengan April 2024 yang sebesar 10,35 persen dari 180 titik observasi.

BPS juga mendata rata-rata harga gabah di 12 provinsi pada Mei 2024. Hanya dua provinsi dengan rata-rata harga GKP di atas HPP hasil fleksibilitas, yakni Sumatera Barat (Rp 7.506 per kg) dan Kalimantan Selatan (Rp 6.515 per kg).

Gabah petani ditolak

Tim *Kompas* menempelekan truk pengangkut GKP dari salah satu anggota kelompok tani ke gudang Bulog Triharjo, Kecamatan Wates, Kulon Progo, pertengahan Mei lalu, ketika masih panen raya.

Truk itu membawa sekitar 3 ton gabah. Setelah truk me-

lewati palang gerbang dan menepi ke kantor pengelola, seorang staf berinisial GS menghampiri kami. Ia menyatakan tidak bisa menerima gabah. "Kalau gudang tidak ada uang. Biasanya, lewat satker Bulog," ucapnya.

Untuk menyerap gabah dan beras, Bulog memiliki Satuan Kerja Pengadaan (Satker ADA) yang bisa "jemput bola" ke sentra-sentra pertanian padi. Menurut GS, satker semacam itu tidak ada di gudang Bulog Triharjo.

Selain itu, gudang memang tidak bisa untuk menyimpan gabah, hanya bisa beras. Ini lantaran fasilitas pengeringan dan penggilingan padi tidak beroperasi lagi. GS menyebut penggilingan terakhir memproduksi beras pada 2019.

Kemudian, GS mengarahkan kami untuk membawa gabah tersebut ke gudang Bulog di Sendangsari, Kabupaten Bantul, yang berjarak lebih dari 25 kilometer. Di antara empat gudang Bulog di DIY, gudang itulah yang masih memiliki penggilingan padi aktif. Gudang tersebut masuk dalam unit bisnis industri Bulog.

Pegecekan berlanjut ke gudang Bulog Bojong Herang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. *Kompas* membawa beras dengan alasan menjajaki kemitraan pengadaan dengan Bulog. Kepala gudang berinisial H meminta *Kompas* mengurus administrasi agar menjadi mitra resmi lebih dahulu sebelum menyalurkan beras.

Gudang Bulog Bojong Herang hanya menyimpan beras, tidak menerima gabah. Beras di gudang itu untuk kebutuhan bantuan pangan. "Kami enggak punya penggilingan. Ada di Sukabumi, tetapi enggak aktif juga," ucap H.

Bulog setempat juga tidak punya program "jemput bola" ke sentra produksi padi. "Kalau dulu, kan, ada satker yang ke desa-desa, ke petani. Sekarang enggak ada," katanya.

Belum optimal

Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membenarkan bahwa tidak semua gudang Bulog bisa menerima gabah. Ha-

nya gudang dari 10 sentra penggilingan padi (SPP) yang bisa.

Lokasi SPP Bulog ada di Subang dan Karawang (Jawa Barat), Sragen dan Kendal (Jawa Tengah), Magetan, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi (Jawa Timur), Lampung, serta Sumbawa (Nusa Tenggara Barat).

Bayu menjelaskan, saat diterima, mutu gabah mesti dianalisis dulu untuk mengetahui kadar air dan kadar hampunya. Setelah itu, gabah mesti segera dikeringkan agar tidak mudah rusak.

Suara daerah pertanian yang tidak dikunjungi tim jemput gabah beras, Bayu menyebut program itu masih baru dan belum optimal. Belum semua kantor wilayah Bulog membentuk tim jemput gabah beras, tetapi ia tidak hafal kantor mana saja yang sudah memiliki tim itu. "Ini sesuatu yang masih harus diperbaiki. Ini belum optimal," ujar Bayu.


Namun, Bayu meminta semua pihak, termasuk media, untuk membantu program jemput gabah beras. Caranya, menginformasikan daerah-daerah dengan harga gabah rendah. "Kami siap beli, kami datang. Tapi ini, kan, butuh kerja sama semua pihak," katanya.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPDI), Khudori, menilai, seluruh pemangku kepentingan mesti terlibat agar semua petani menikmati fleksibilitas HPP. Tidak hanya level pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah mesti cepat menginformasikan Bulog jika ada area produksi padi dengan harga gabah rendah sehingga Bulog segera menjemput.

"Kaki dan tangan Bulog itu terbatas, belum menjangkau petani. Semestinya kalau (gabah) memenuhi kriteria, tidak boleh ada kejadian itu," ucap Khudori, Senin (10/6/2024).

Meski demikian, lanjut Khudori, kasus harga gabah di bawah HPP merupakan persoalan skala lokal. Titik-titik observasi BPS tempat harga gabah di bawah HPP bisa jadi belum menjadi titik sasaran Perum Bulog, penggilingan, dan pedagang untuk penyerapan pada musim panen ini.

(JOG/FRD/VAN/MEL/ILO)

Title	Harap-harap Cemas Kenaikan Harga Beras	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	2	
Author	JOG/FRD/VAN/MEL/ILO	

PANGAN

Harap-harap Cemas Kenaikan Harga Beras

Kecemasan melanda warga yang berurusan dengan beras. Harga bahan pangan ini dinilai belum stabil. Langkah yang tepat dibutuhkan agar tidak kelimpungan menghadapi ketidakpastian.

Situasi ini dihadapi Hanto (46), pemilik Warteg Dadijaya, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Di tengah ketidakpastian harga beras, ia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan.

Ia bergegas bangkit dari kursi saat ada pembeli pada Selasa (11/6/2024). Hanto berusaha menjaga harga dagangannya stabil meski harga bahan-bahan pangan, termasuk beras, naik turun. "Kalau bisa, jangan sampai kejadian harga beras naik," kata pemilik warung asli Kota Tegal, Jawa Tengah, itu.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, harga beras berpotensi naik lagi karena produksi padi pasca-puncak panen raya April-Mei 2024 turun. Kerangka Sampel Arca BPS menunjukkan, produksi padi secara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 masing-masing sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton.

Adapun produksi pada Juni 2024 diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan pada Juli 3,73 juta ton. Artinya, produksi padi berpotensi turun 40-50 persen pada Juni-Juli 2024 dibandingkan puncak panen raya padi (Kompas.id, 11/6/2024).

Keuntungan berkurang

Menurut dia, jika harga beras naik lagi, keuntungan yang bisa diambil dari usaha wartegnya akan turun. Sekitar dua tahun lalu, ia biasa membeli beras Rp 9.500-Rp 10.000 per liter (1 liter sama dengan 0,753 kilogram).

Harga mulai naik ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter pada awal tahun ini dan men-

Kalau biaya produksinya naik, kemudian harga berasnya tidak naik, kasihan petani, kasihan penggiling padinya.

Arief Prasetyo Adi

capai Rp 13.000 per liter bulan Februari. Kini, harga sudah menjinjak, tetapi hanya kembali ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter.

Mengapa keuntungan Hanto yang berkurang, bukan porsi makanan yang berkurang atau harga bagi konsumen yang jadi naik?

"Saya perlu menjaga pelanggan. Di sini persaingan sudah ketat," ucapnya.

Ai Anggraini (31), ibu rumah tangga di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, juga berharap harga beras tak sampai naik. Selisih Rp 1.000-Rp 3.000 per liter beras berarti untuk menghemat pengeluaran keluarga.

Ai rata-rata membeli beras 1 liter per dua hari pada harga Rp 10.500. Artinya, dalam sebulan pengeluaran untuk beras Rp 157.500. Pada Februari 2024, beras jenis yang sama harganya Rp 13.000 per liter sehingga dalam sebulan ia mengeluarkan Rp 195.000 untuk beras.

Bukannya tak mampu membeli beras, tetapi kebutuhan hidup Ai dan suami serta dua anak mereka tak cuma beras. Baik Hanto, Ai, dan banyak warga lain sedang harap-harap cemas jika harga beras kembali melonjak. Sebab, bagi mereka, beras sudah menjadi kebutuhan pokok yang belum terganggu.

Kompas sempat merekam kesulitan warga ketika harga beras melambung. Mereka bahkan tinggal di tengah kepungan sawah, yaitu di Indramayu dan Subang, Jawa Barat.

Saat dijumpai pada pertengahan Maret 2024 di Kabupaten Indramayu, pemilik warung nasi uduk dan nasi kuning bernama Winda mencurahkan keluh kesahnya.

"Di tempatnya beras (lumbung padi), harga justru mahal," ujar Winda, di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan.

Winda saat itu baru saja membeli beras senilai Rp 17.000 per kg. Tahun lalu, Winda membeli beras rata-rata seharga Rp 12.000 per kg. Setelah panen raya berkisar September-Oktober 2023, harga mulai merangkak ke angka Rp 14.000, Rp 15.000, hingga kemudian Rp 17.000 per kg (selisih hampir 30 persen) yang dia rasakan kurun sebulan.

Merosot

Dampaknya, penghasilan Winda merosot tajam. Ia bisa meraup untung minimal Rp 50.000 per hari sewaktu harga beras masih Rp 12.000 per kg. Kini, laba minimal jadi Rp 20.000 per hari.

Situasi ini menjadi ironi. Sebab, Indramayu selama ini dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.

Merujuk pada data BPS Jawa Barat tahun 2023, Indramayu menjadi produsen padi tertinggi di provinsi tersebut. Dari total produksi padi 9,09 juta ton di Jawa Barat, Indramayu menyumbang 1,4 juta ton.

Kenaikan harga beras tak hanya diderita mereka yang hidup di sekitar sawah. Mereka yang biasa di dalam sawah pun turut menanggung dampaknya. Contohnya Kasan, warga Desa

Mundusari Kecamatan Pusakagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Buruh tani berusia 60-an tahun itu tak punya modal mengelola sawah sendiri.

Ia hanya mengandalkan panggilan dari pemilik sawah atau pemborong pekerjaan untuk mendapat upah maksimal Rp 100.000 per hari. Panggilan pun datang hanya untuk tiga-empat hari seminggu.

Honornya selalu dalam bentuk uang tunai. Karena itu, meski turut berjasa memproduksi padi, Kasan tidak pernah menyimpan gabah sebagai stok pangan. Ayah dua putra itu senantiasa membeli beras.

Harga beras sudah turun ke Rp 13.000 per liter dari angka Rp 14.000 per liter. Namun, harga masih amat tinggi jika dibandingkan dengan masa panen yang lalu. Saat itu, harga beras Rp 9.000-Rp 10.000 per liter.

Kasan tinggal dengan istri dan putra bungsu mereka yang belum berkeluarga. Mereka biasanya menghabiskan seliter beras per hari. Apabila seminggu Kasan menghasilkan Rp 300.000, pengeluaran untuk beras mengeruk 30 persennya.

"Kalau lagi enggak ada uang beli beras, cari kerja lagi. Kalau tidak, ya, berutang ke saudara," ujarnya saat rehat seusai menanam padi di sawah di tepi jalan raya pantura.


Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebutkan, pemerintah menjaga harga beras agar tetap terjangkau daya beli warga. Di sisi lain, tidak menjatuhkan harga gabah petani.

"Kalau biaya produksinya naik, kemudian harga berasnya tidak naik, kasihan petani, kasihan penggiling padinya," ucapnya.

(JOG/VAN/MEL/FRD/ILO)

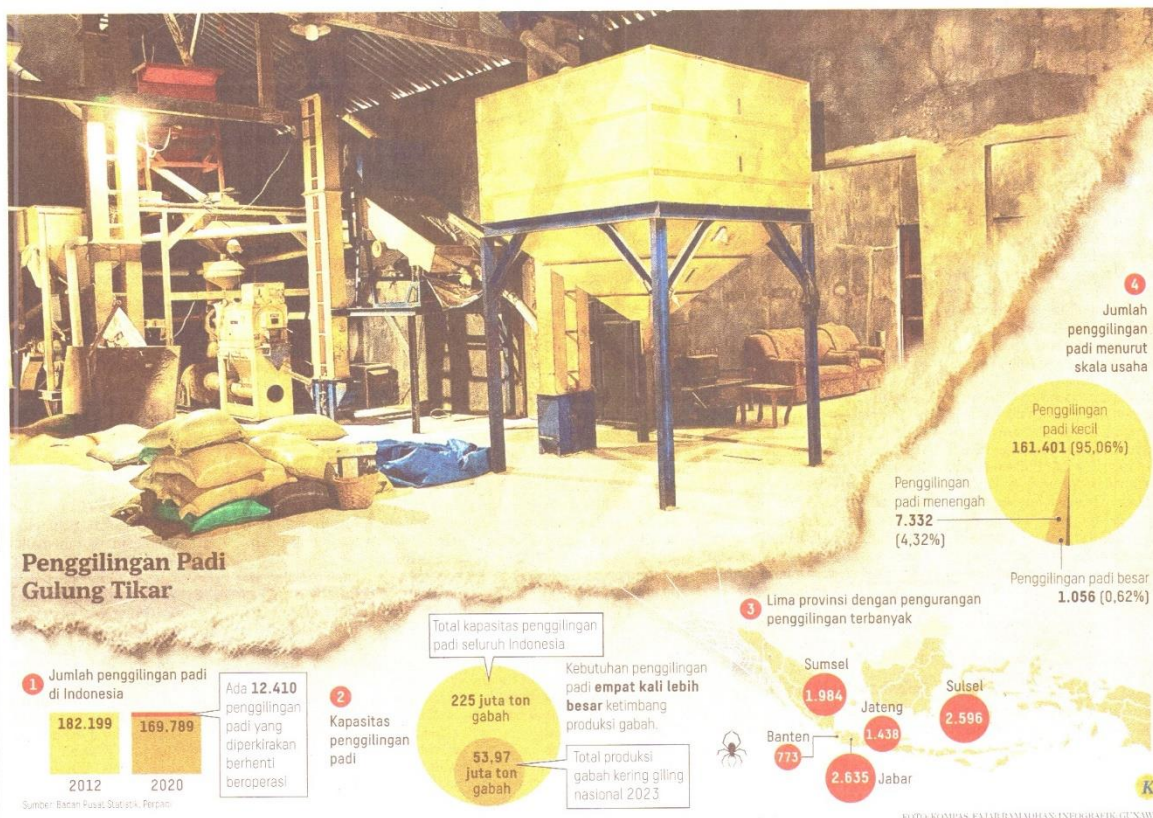
Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Kalah Bersaing, Ribuan Penggilingan Padi Mati	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	1 Part 1	
Author	FRD/JOG/MEL/VAN/HEN/ILO	

Kalah Bersaing, Ribuan Penggilingan Padi Mati

Penggilingan padi skala kecil di daerah terpaksa berhenti beroperasi karena berbagai penyebab, seperti kesulitan dana dan persaingan. Padahal, mereka menopang ekonomi perdesaan.



JAKARTA, KOMPAS — Persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar. Penggilingan kecil ini rontok satu per satu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan teknologi pengolahan yang lebih mutakhir.

Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Selain menyediakan lapangan kerja, keberadaannya juga turut meningkatkan nilai tambah produksi pertanian.

Kompas menemukan fakta tersebut pada periode Maret-Mei 2024 di sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa. Nurfuddin (43), pengelola penggilingan padi skala kecil di Desa Bumi Asih, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, misalnya, baru memproduksi beras lagi Maret 2024, itu pun sepekan sekali.

Penggilingan berkapasitas produksi 10 ton beras itu "mati

suri" sekitar tiga bulan akibat tidak punya modal untuk membeli gabah di harga tinggi. Dia juga kesulitan bersaing di pasar dalam menjual beras. Ia cuma mampu menghasilkan beras berkualitas medium yang rata-rata baru habis seminggu setelah giling.

Sebenarnya, Nurfuddin tidak terlalu pusing jika Perum Bulog mau membeli berasnya. Namun, standar mutu beras yang bisa diterima Bulog kian tinggi sehingga kualitas berasnya tidak masuk lagi. Jika mau menembus Bulog, Nurfuddin mesti memperbaiki penggilingannya agar kualitas produknya meningkat. "Bukannya tidak mau memperbaiki. Saya terburutur dana," ucap Nurfuddin.

Nurfuddin menilai, pemerintah belum memberikan solusi agar penggilingan kecil tidak bangkrut. Salah satu bantuan utama yang diharapkan adalah agar pengusaha penggilingan kecil bisa mengakses pinjaman berbunga rendah guna memodernisasi mesin.

LIPUTAN KHUSUS

BACA JUGA HLM 2

>> BACA BESOK:

Rantai Pasok Gabah Dikuasai Calo

Keberadaan calo memperpanjang rantai pasok gabah.

Adapun Ferry Priyatna (58), pelaku usaha penggilingan yang ada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bahkan terpaksa berhenti beroperasi sejak dua tahun lalu akibat kalah saing dengan penggilingan padi berskala besar. "Mereka (produsen besar) berani beli harga gabah dengan harga tinggi. Kami jelas kalah," kata Ferry yang kini menjadi perantara penjualan beras antarpedagang.

Penggilingan padi milik Ferry yang berada di Kecamatan

an Widasari itu biasanya mampu mempekerjakan 10-12 orang untuk proses produksi dalam menghasilkan beras. Setelah penggilingannya berhenti beroperasi, semua pekerja juga turut diberhentikan.

Ferry mengakui, selain kalah modal dan teknologi dari penggilingan besar, harga jual beras yang tidak stabil juga turut memperburuk keadaan.

Situasi serupa dialami Dio (53), pengelola penggilingan padi di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk sementara, dia menghentikan operasionalisasi penggilingannya karena harga gabah dan beras masih belum stabil. "Kami tidak membeli gabah dulu," kata Dio, Kamis (2/5/2024).

Kondisi ini ia alami sejak 2022. Dia harus mengeluarkan biaya besar untuk menggiling, mengeringkan, dan mengemas hasil penggilingan. "Tidak ada jaminan harga gabah dan beras stabil ke depan. Ini seperti berjudi," kata Dio.


Ketua Umum Perkumpulan

Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyebutkan, sedikitnya ada 10.000 penggilingan padi yang tutup sejak 2012 hingga saat ini. Jumlah tersebut didominasi penggilingan padi skala kecil yang kalah bersaing dalam perebutan gabah petani.

"Ekonomi secara makro ini akan kuat jika ditopang oleh akar rumput yang ekonominya kuat juga. Penggilingan padi kecil menjadi pilar ekonomi perdesaan," kata Sutarto, Selasa (11/6).

Menunjuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, penggilingan padi di Indonesia berjumlah 182.199. Pada 2020, jumlahnya turun menjadi 169.789. Dari jumlah tersebut, sebanyak 161.401 merupakan penggilingan padi skala kecil. Penggilingan padi kecil merupakan penggilingan yang memproduksi beras kurang dari 1,5 ton per jam. Tren penurunan

(Bersambung ke hlm 15 kol 4-7)

Title	Kalah Bersaing, Ribuan Penggilingan Padi Mati	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	1 Part 2	
Author	FRD/JOG/MEL/VAN/HEN/ILO	

Kalah Bersaing, Ribuan Penggilingan Padi Mati

(Sambungan dari halaman 1)

jumlah penggilingan kecil terus terjadi hingga 2024.

Penyebab utama tutupnya penggilingan padi skala kecil adalah produktivitas padi yang menurun setiap tahun. Di sisi lain, penggilingan padi skala besar terus bermunculan. Dengan teknologi yang lebih modern dan modal yang lebih besar, mereka lebih agresif menyerap gabah petani.

Dari jumlah penggilingan saat ini, kebutuhan gabah mereka mencapai 225 juta ton. Artinya, angka ini empat kali lebih besar dibandingkan dengan total produksi gabah kering giling (GKG) nasional 2023, sesuai data BPS, yakni 53,98 juta ton.

Kehilangan pekerjaan

Sutarto memperkirakan, 30.000-50.000 orang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya penggilingan skala kecil. Dengan asumsi, satu penggilingan memiliki 3-5 pekerja. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian beralih menjadi makelar atau tengkulak gabah.

"Ada pemilik penggilingan yang bilang, dia sekarang hanya jual gabah dari petani langganannya ke penggilingan besar. Dia akhirnya hanya ambil selisih dari situ," tuturnya.

Tutupnya penggilingan padi skala kecil di desa-desa juga memperpanjang rantai pasok gabah dari petani ke produsen, mengingat petani tidak lagi leluasa mengakses penggilingan di daerah mereka. Petani akhirnya bergantung pada peran para perantara agar gabah mereka bisa terserap ke penggilingan padi di luar daerah.

Ekosistem perberasan nasional pada akhirnya akan dikuasai oleh korporasi menyusul tumbangannya penggilingan skala kecil. Dalam skema ini, petani hanya akan menjadi buruh tani dengan daya tawar yang rendah. "Jangankan untuk mengejar produktivitas padi, ke depan tidak akan ada yang mau jadi buruh tani," kata Sutarto.

Penentu harga

Penelusuran *Kompas* di Ngawi, Jawa Timur, perusahaan penggilingan padi skala besar, seperti PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) dan PT Surya Pangan Semesta (SPS), menjadi penentu harga gabah sehingga petani dan tengkulak memilih menjual gabah hasil panen kepada perusahaan tersebut ke timbangan ke penggilingan padi skala kecil.

Di Ngawi, *Kompas* mendampingi penggilingan padi kecil milik RN pada akhir Maret 2024. RN selama ini rutin menyuplai gabah kering panen (GKP) dari petani ke PT WPI. Melalui aplikasi Wilmar Farmer Operations Management System di gawainya, RN menunjukkan harga GKP dalam tiga hari ke depan. Pada 31 Maret dan 1 April 2024, harganya adalah Rp 5.800 per kilogram. Adapun pada 2 April 2024 harga turun menjadi Rp 5.700.

Harga tersebut adalah plafon GKP per kilogram (kg) yang ditentukan oleh PT WPI kepada semua mitranya. Plafon ini menjadi landasan bagi para mitra saat membeli gabah dari petani. Saat plafon Rp 5.800, misalnya, RN membeli GKP dari petani dengan harga Rp 5.300-Rp 5.400 per kg.

Tanggal 4 Maret 2024, pada aplikasi Farmer System di gawai RN tertera gabah yang dikirim ke WPI dihargai sekitar Rp 7.400. WPI kemudian menurunkan harga GKP secara berkala. Tanggal 22 Maret 2024, harga GKP turun menjadi sekitar Rp 6.800. Adapun pada 28 Maret 2024 harganya kembali turun menjadi sekitar Rp 6.300.

Menurut RN, harga GKP oleh PT WPI setiap hari relatif hampir sama dengan harga yang dipatok perusahaan lain, seperti PT SPS. Kalaupun ada selisih, hanya sekitar Rp 100. "(Harganya) tarik ulur. Kadang tinggi yang sana, kadang tinggi yang sini," ujar RN.

Hal yang sama diakui SR, pemilik penggilingan kecil di Ngawi, yang juga bermitra dengan PT WPI dan PT SPS. SR mengakui, harga gabah di tingkat petani sangat ditentukan oleh harga plafon dari dua per-

usahaan raksasa tersebut.

Diikuti yang lain

Plafon perusahaan ini tidak hanya menjadi acuan penyuplai gabah ke PT WPI dan PT SPS, tetapi juga perantara gabah yang tidak terkait sama sekali dengan produsen besar. Pengakuan ini diaminai DM, penebas asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Sabtu (30/3), DM datang ke Ngawi untuk membeli gabah petani. DM adalah penebas sekaligus mitra penggilingan padi besar asal Sragen. Di sela-sela menunggu proses pemotongan gabah, DM bercerita bahwa harga jual gabah ke penggilingan padi hari itu adalah Rp 5.800 per kg. Harga itu serupa dengan yang ditetapkan WPI di hari yang sama.

Harga GKP sekitar Rp 5.000 di tingkat petani pada akhir Maret hingga awal April 2024 dikeluhkan TR, petani Desa Geneng, Ngawi. Dengan harga tersebut, keuntungan petani sangat kecil.

Harga dasar

Ketika ditemui, Presiden Direktur PT Wilmar Padi Indonesia Saronto Soebagio mengatakan, WPI selama ini memang mematok *base price* (harga dasar) GKP. Harga tersebut bisa naik dan turun sesuai dengan situasi, menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Perubahan harga tidak terjadi secara harian, tetapi mingguan. "Biasanya karena panen. Kalau panen banyak, harga akan turun," kata Saronto, di Jakarta.

Saronto tidak sepakat jika PT WPI dianggap mengendalikan harga gabah. WPI selama ini hanya membeli gabah dengan harga yang wajar. Harga yang dipatok WPI kemudian secara alamiah diikuti oleh kompetitor karena mereka khawatir tidak kebagian gabah jika membeli di bawah harga WPI. "Orang selalu melihat Wilmar karena kami memang menyerap gabahnya banyak. Itu saja sebenarnya," kata Saronto.

Kompas meminta konfirmasi SPS melalui pesan singkat dan

telepon ke nomor yang tercantum di laman beraskediri.com. Laman itu milik CV Sumber Pangan yang juga dibentuk oleh pendiri PT Surya Pangan Semesta, Yimmy Stephanoes.

Seorang anggota staf penguna nomor itu menginformasikan bahwa Yimmy bisa ditemui, tetapi waktunya belum pasti. "Info dari narahubungnya, untuk saat ini Pak Yimmy belum bisa ditemui," ucap anggota staf itu, Selasa (4/6). *Kompas* kemudian meminta jawaban tertulis pada hari yang sama. Namun, permintaan itu belum direspons hingga Senin (10/6).

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menilai, petani kini sedang diuntungkan dengan langkah produsen besar yang berani membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada biasanya. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi makin banyaknya penggilingan skala kecil yang tumbang karena bisa membuat penggilingan-penggilingan besar jadi penentu harga ke depannya.

"Nanti ketika yang kecil-kecil sudah mulai mati, tinggal yang gede-gede, bisa saja (mereka) menekan petani," ujar Andreas.

Merespons fakta itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendorong agar semua mau saling memberi manfaat. "Penggilingan padi besar ini sebenarnya bisa bermitra dengan penggilingan padi kecil," ucap Arief. Ia mencontohkan, pabrik besar bisa membeli produk pabrik beras kecil berupa beras berkualitas rendah, diolah lagi jadi beras premium.

Melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, pemerintah berupaya memperkuat korporasi petani di bidang pangan melalui koperasi-koperasi petani. Hal itu disampaikan Teten saat meresmikan penggilingan padi modern milik Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia di Indramayu, Jawa Barat.

(FRD/JOG/MEL/VAN/HEN/ILO)

Title	Ngawi, Magnet Industri Beras yang Memikat Pemain-pemain Besar
Date	12 Juni 2024
Media	Kompas
Page	2
Author	MEL/FRD/JOG/VAN/ILO



Kementerian Pertanian



Buruh tani mengangkut gabah hasil panen di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024).

SENTRA PADI

Ngawi, Magnet Industri Beras yang Memikat Pemain-pemain Besar

Kabupaten Ngawi bisa jadi tidak sepopuler daerah lain di Jawa Timur, kecuali bagi mereka yang mendalami dan menyukai sejarah. Ada Museum Trinitil yang menunjukkan bahwa kabupaten ini merupakan tempat penemuan pertama fosil manusia purba di Tanah Air.

Tidak hanya itu, Ngawi juga terkenal sebagai salah satu lumbung padi di Jatim, bahkan nasional. Merujuk pada portal Pemerintah Kabupaten Ngawi, sekitar 40 persen dari total luas wilayah Ngawi berupa sawah. Tak heran, jika melintasi Jalan Tol Trans-Jawa, akan disugahi pemandangan sawah sepanjang ruas tol Sragen-Ngawi.

Menelusuri data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim tahun 2023, Ngawi menduduki peringkat kedua penghasil beras terbanyak di Jatim, yakni 445.336,1 ton beras dari total luas panen 124.922,92 hektar. Peringkat pertama adalah Lamongan (461.188,28 ton beras). Kemudian, setelah Ngawi, ada Kabupaten Bojonegoro (407.637,03 ton beras).

Ketiga kabupaten itu berkontribusi 14 persen dari total produksi beras di Jatim yang mencapai 9,71 juta ton dan menenggelamkan provinsi itu sebagai daerah penghasil padi tertinggi secara nasional mengalahkan Jawa Barat.

Empat tahun berturut-turut, Jatim menjadi produsen padi tertinggi secara nasional. Menariknya, luasan sawah padi di Bojonegoro jauh lebih banyak dibandingkan Ngawi, yakni 132.712,02 hektar. Akan tetapi, produksi beras Ngawi lebih tinggi daripada Bojonegoro.

Presiden Joko Widodo mengakui keunggulan produksi beras Ngawi di acara Panen Raya Padi Nusantara 1 Juta Hektar pada Maret 2023 di sana. Jika dibandingkan dengan daerah sentra padi di Jabar, produksi beras di Ngawi pada 2023 masih di bawah lumbung padi nasional, seperti Indramayu (819.872 ton) dan Karawang (633.300 ton).

Pertengahan Maret 2024, terlihat sejumlah petani di Ngawi memanen lahennya. Gabah mereka tak hanya laku dijual di sekitar Ngawi, tetapi juga dikirim ke Klaten, Demak, dan Jakarta. Ngawi berada di area perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah yang dimudahkan dengan jalur tol. Beras Ngawi dapat dengan mudah didistribusikan ke mana pun.

Posisi ini memikat perusahaan besar, antara lain PT Wilmar Padi Indonesia, PT Surya Pangan Semesta, dan PT Daya Tani Sembada. Sebagian besar gabah yang dipanen di Ngawi banyak di-

serap produsen beras tersebut. Mereka juga menyerap gabah dari kabupaten di sekitar Ngawi, seperti Magetan, Madiun, Sragen, dan Grobogan.

Sawah di Ngawi rata-rata bisa ditanami padi hingga tiga kali. Artinya, sepanjang tahun tidak ada jeda waktu kosong membiarkan lahan diam. Produktivitas beras di Ngawi lumayan tinggi, mungkin karena tingkat kesuburan tanahnya, yakni berdekatan dengan Gunung Lawu dan diapit dua sungai, Bengawan Solo dan Bengawan Madiun.

Pengairan

Selain dari Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, pengairan sawah di Ngawi juga banyak dibantu adanya sumur bor dari pompa yang dibangun petani di sekitar sawah.

Menurut Wawan, petani asal Ngawi, para petani di wilayahnya tidak begitu mengharapkan bantuan pemerintah. Mereka memilih mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan pengairan sawahnya. Misalnya, membuat sumur dan pompa (sibol) sendiri seharga Rp 25 juta untuk kedalaman 40 meter.

"Banyak petani mandiri tetapi tidak pernah dibantu hasilnya dan dipandang sebelah mata sama pemerintah," ucapnya.

Kedalaman sumur di setiap sawah berbeda, tergantung kondisi tanah dan kesediaan air setelah dihor. Sering kali kedalamannya bisa lebih dari 40 meter untuk mendapatkan air. Sumur dengan kedalaman demikian bisa digunakan untuk mengairi satu hektar sawah setiap hari.

Sementara air dari sungai irigasi hanya bisa mengairi sawah secara bergantian, yakni dijajah seminggu sekali untuk dialiri selama satu jam. Padahal, idealnya seminggu awal tanam harus dialiri air tiga kali seminggu. Pada musim kemarau, intensitas untuk mengairi sawah meningkat jadi setiap hari.

Keberadaan sumur sangat membantu petani untuk bisa melokalkan tugas ke tanam padi. Namun, tidak semua petani mampu membangun sumur dan pompa. Mereka yang tidak mampu biasanya ikut dengan sumur tetangga dengan membayar ongkos pulsa listrik Rp 4.000 per jam.

Byu Dwi Apri Nugroho, pengajar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem di Universitas Gadjah Mada, mengatakan, pembuatan sumur irigasi di Ngawi dan beberapa daerah di Jawa Timur dapat menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain. Mengingat air merupakan komponen penting dalam

proses tanam padi.

Namun, biaya pembangunan sumur yang tidak sedikit menjadi kendala bagi sejumlah petani. Biaya menyamakan agar sumur dibangun secara bersama-sama dari dana desa atau kelompok tani.

"Sawah itu tidak harus selalu ditanami, tetapi disesuaikan dengan fasenya. Mendekati panen justru airnya dikurangi. Ini contoh pertanian ramah lingkungan," ucap Bayu.

Teknologi pertanian

Faktor penunjang produktivitas padi adalah dukungan dari pemerintah daerah yang mendorong pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Bahkan, beberapa petani di Ngawi telah mengurangi penggunaan pupuk kimia dan justru memperbanyak pupuk organik di sawahnya.

Pupuk organik ini mereka buat sendiri dari campuran bahan, antara lain sisa sampah makanan dari dapur, kotoran unggas, kotoran ternak, dan sampah daur ulang.

Selain berpengaruh pada peningkatan produktivitas, beras yang ditanam dengan minim pupuk kimia diyakini menghasilkan rasa yang jauh lebih enak. Selama di Ngawi, Kompas singgah ke rumah makan atau warung nasi untuk bersantap. Tekstur nasiinya pera, tetapi saat dikunyah pulen.

Petani asal Ngawi, Karsi, meyakini padi yang diberi pupuk ramah lingkungan menghasilkan rasa beras yang jauh lebih enak dan sehat. Ongkos yang dikeluarkan untuk membeli pupuk kimia buatan pabrik pun jauh lebih mahal dibandingkan dengan membuat pupuk alami sendiri. Ia mencontohkan ongkos produksi bisa mencapai Rp 15 juta per hektar, tetapi penggunaan pupuk ramah lingkungan mampu menghemat hingga Rp 3 juta-Rp 5 juta.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Dykik Rudy Prasetya mengatakan, Ngawi dinobatkan sebagai daerah Peduli Ketahanan Pangan tahun 2023 oleh Gubernur Jatim saat peringatan Hari Pangan Sedunia di Provinsi Jatim. Ngawi adalah daerah penghasil padi nomor dua terbesar di Jatim.

Menurut dia, Ngawi banyak menerapkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. "Indeks Pertanian (IP) rata-rata di Ngawi adalah 2,8. Pada lahan irigasi, IP padi rata-rata 3. Dengan adanya irigasi perompangan di daerah lain, tidak hanya meningkatkan dampak signifikan terhadap peningkatan indeks pertanaman," kata Rudy.

(MEL/FRD/JOG/VAN/ILO)

BIRO HUKUM

PUBLIK

Title	Pemerintah Pelajari Investasi Beras di Kamboja
Date	12 Juni 2024
Media	Kompas
Page	9
Author	HEN/INA



Kementerian Pertanian



KOMPAS PHOTOGRAPHY

Tamu undangan melihat kualitas beras premium hasil produksi pabrik penggilingan padi modern PT Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Petani Sejahtera Nusantara (PSN) di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024).

Pemerintah Pelajari Investasi Beras di Kamboja

Indonesia bisa memiliki cadangan beras di luar negeri jika memiliki sumber beras di negara sentra beras. Namun, pemerintah diminta tetap perlu memprioritaskan peningkatan produksi beras dalam negeri.

INDRAMAYU, KOMPAS — Badan Pangan Nasional masih akan mempelajari dan menajaki terlebih dahulu rencana akuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Dengan memiliki pabrik di Kamboja, Indonesia bisa memiliki cadangan beras di luar negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku Bapanas akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menajaki dan kemudian merealisasikan rencana akuisisi itu.

"Hal itu bisa menjadi solusi pada saat Indonesia kekurangan beras dan kesulitan memperoleh beras impor serta ketika harga beras dunia mahal," kata Arief saat menghadiri peresmian pabrik penggilingan padi modern PT Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Petani Sejahtera Nusantara (PSN) di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024).

Sebelumnya, sesuai menghadiri Hari Ulang Tahun Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin lalu, Presiden Joko Widodo meminta Bulog mengakuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Presiden menyatakan, investasi Bulog di Kamboja diperlukan guna memberikan kepastian stok cadangan beras nasional dalam posisi aman.

"Daripada beli (impor beras), ya lebih bagus investasi," kata Presiden. Selama ini Indonesia mendapatkan beras impor, salah satunya dari Kamboja.

Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi yang meminta Bulog mengakuisisi perusahaan penggilingan beras di Kamboja. Dengan memiliki cadangan beras di luar negeri, pemerintah bisa dengan mudah mendatangkan beras itu pada saat terjadi kekurangan beras di dalam negeri.

Jika tidak dibutuhkan, pemerintah bisa menjual beras tersebut di Kamboja atau negara lain yang membutuhkan. Kendati begitu, pemerintah tetap perlu memprioritaskan meningkatkan produksi dalam negeri.

"Harga gabah di tingkat petani juga tetap perlu dijaga karena hal itu menjadi kunci peningkatan produksi beras di dalam negeri," katanya

Penggilingan modern

Sejauh ini petani dan pemerintah terus mengembangkan pabrik-pabrik penggilingan padi modern untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Upaya itu juga dalam rangka memberikan nilai tambah bagi petani dan memperkuat cadangan beras pemerintah.

Pada Selasa, para petani yang tergabung dalam AB2TI resmi mengoperasikan pabrik peng-

gilingan padi modern mereka di Indramayu. Pabrik yang dikelola badan usaha milik petani, yakni Koperasi AB2TI, tersebut akan memproduksi beras premium sebanyak 40 ton per hari.

Pabrik tersebut diresmikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki. Selain Arief, peresmian juga dihadiri Bupati Indramayu Nina Agustina.

Kehadiran PT AB2TI PSN itu menambah jumlah pabrik penggilingan padi modern yang dikembangkan koperasi petani. Salah satunya adalah Koperasi Citra Kinaraya yang mengelola pabrik beras premium dan khusus di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Di samping itu, Perum Bulog juga telah memperkuat 10 sentra penggilingan padi di daerah-daerah sentra beras.

Teten Masduki mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM tengah berupaya memperkuat koperasi petani di bidang pangan melalui koperasi-koperasi petani. Tujuannya adalah membangun ekosistem pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Melalui koperasi, kelompok petani bisa membangun usaha pertanian bernilai tambah dan memasarkan produk-produk ke ritel atau industri manufaktur yang membutuhkan bahan baku pangan. Sejumlah langkah

konkret telah dilakukan tidak hanya di bidang perberasan, tetapi juga sayuran dan kacang-kacangan.

Teten juga mengapresiasi para petani yang tergabung dalam AB2TI yang mampu membangun pabrik penggilingan padi secara mandiri. Pabrik tersebut bisa menjadi salah satu model korporasi petani yang mampu mengintegrasikan pertanian dari hulu ke hilir.

AB2TI telah mengembangkan benih padi sendiri, membuat pupuk secara mandiri, hingga membangun pabrik penggilingan padi. Namun, yang bakal menjadi tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan suplai gabah ke pabrik dan pemasaran beras premium yang dihasilkan.

"Jangan sampai pasokan gabah terhenti gara-gara petani yang menjadi pemasoknya tergiur dengan harga gabah yang lebih tinggi dari tengkulak atau pedagang perantara," katanya.

Dwi menambahkan, dengan kehadiran pabrik itu, petani tidak hanya menjual gabah, tetapi juga beras premium. Pabrik tersebut juga akan menjadi model pengembangan pabrik penggilingan beras premium di sejumlah daerah jaringan AB2TI.

Pengembangan itu baru akan dilakukan setelah melihat perkembangan pabrik AB2TI di Indramayu dalam 1-6 tahun ke depan. "Setelah 1-2 tahun


pabrik tersebut berjalan, kami juga akan mengembangkan AB2TI Mart sebagai tempat pemasaran produk-produk kami. Kami juga akan membuat pabrik pupuk sendiri untuk menopang produksi padi," katanya.

Arief berharap AB2TI dapat meningkatkan produksi pabrik tersebut ke depan. Hal itu bisa dilakukan dengan menambah fasilitas penerangan gabah dan mitra petani pemasok gabah.

Bapanas juga telah meminta Bulog untuk menjadi pembeli siaga beras yang diproduksi pabrik AB2TI. Kendati begitu, Bapanas berharap agar Koperasi AB2TI mempunyai sasaran pemasaran tersendiri.

"Bisa saja bekerja sama dengan penggilingan besar beras, seperti Wilmar, koperasi-koperasi pangan lain, hingga instansi-instansi pemerintah," ujarnya.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Bulog pada Senin (10/6), Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, Bulog telah mengoperasikan semua sentra penggilingan padi modern. Dari total kapasitas sekitar 60.000 ton setara beras, realisasi produksi beras di semua sentra penggilingan padi itu telah mencapai sekitar 50.000 ton. Sentra penggilingan padi di antaranya berada di Subang, Karawang, Lampung, Kendal, Sragen, dan Sumbawa. (HEN/INA)

Title	Upaya Bertahan Hidup dengan Produksi Beras Ketan	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	1 Part 1	
Author	J Galuh Bimantara/Melati Mewangi/Stefanus Ato/Fajar Ramadhan/Harry Susilo	

NASIB PENGGILINGAN KECIL

Upaya Bertahan Hidup dengan Produksi Beras Ketan

**J Galuh Bimantara/
Melati Mewangi/
Stefanus Ato/Fajar
Ramadhan/Harry Susilo**

Suatu sore di pertengahan Maret 2024, seorang pedagang gabah mendatangi Ratnadi (47), pemilik penggilingan padi rakyat di Desa Jatreja, Kecamatan Comprang, Subang, Jawa Barat. Pedagang itu membawa baki berisi padi dan menawarkan ke Ratnadi.

"Kok, beda dengan yang di video?" tanya Ratnadi kepada si calo. Menurut rencana, gabah itu akan diolah jadi beras IR, nama populer warga setempat untuk menyebut beras bahan pangan sehari-hari. Jelas ini bukan jenis beras ketan. Setelah mempertimbangkan mutu gabah dan situasi pasar, Ratnadi menolak membeli dan

mengarahkan pria tadi ke pengolahan padi lain.

Ayah tiga anak ini memilih menggiling gabah ketan karena tak kuat bersaing menggiling gabah untuk beras konsumsi. Ia tidak punya modal cukup untuk membeli gabah dalam jumlah besar, apalagi jika terjadi kenaikan harga di pasaran. Sementara kini makin banyak penggilingan berteknologi mutakhir yang bisa menghasilkan beras lebih melimpah, tetapi harganya murah. Pangsa pasar Ratnadi direbut mereka.

Daripada babak belur bertahan di beras umum, ia beralih memproduksi beras ketan. Beruntung, Subang punya jenis ketan unggulan, yaitu ketan grendel. Karena produksi ketan, penggilingan Ratnadi yang berkapasitas produksi 15 ton beras sekali giling tetap ber-

operasi, tetapi hanya berkuat di ketan.

Usaha penggilingannya mulai meredup sejak adanya pandemi Covid-19. Saat itu permintaan toko-toko beras menurun karena pasar sepi konsumen. Selain itu, pabrik dengan peralatan modern bertambah. Mereka mampu beroperasi lebih efisien dengan hasil lebih maksimal.

Akibatnya, Ratnadi kehilangan pelanggan. Sebelumnya, ia punya tiga toko langganan di Jakarta dan Bogor, termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Sebelum pandemi Covid-19, keuntungan lebih bisa diprediksi karena penjualan lebih banyak dengan sistem prapesan. "Kadang saya minta uang duluan buat DP (uang muka), dikasih," katanya. Kini, jika Ratnadi mau me-

masuk beras ke Cipinang, produksinya mesti dikonteskan terlebih dahulu, bersaing dengan beras dari pabrik-pabrik lain. Jika sedang tidak beruntung, ia bisa *bongcos* karena harga yang disepakati dengan pembeli membuatnya tidak bisa balik modal.

Beras pecah kulit

Penggilingan kecil di Sragen, Jawa Tengah, juga harus mati-matian bertahan di tengah situasi yang sulit. Minimnya modal membuat mereka tidak kebagian gabah petani sehingga berhenti beroperasi. Mereka kesulitan bersaing dengan para perantara perusahaan penggilingan yang lebih agresif menyerap gabah petani.


Hal ini setidaknya dialami Puji (45), pemilik penggilingan di Sragen. Alat penggilingan di

belakang rumahnya dibiarkan mangkrak begitu saja. Tidak terlihat ada bekas gabah atau beras di gudang yang ukurannya hampir setara dengan lapangan tenis. Minimnya modal membuat Puji tidak lagi menggiling padi menjadi beras konsumsi.

Keberadaan sejumlah perusahaan penggilingan padi di sekitar Sragen juga membuat para perantaranya, seperti pelepas, tengkulak atau *ceninik* (sebutan untuk calo), begitu agresif dalam menyerap gabah petani. Tak main-main, dalam sehari, satu orang perantara bisa menyalurkan 4-5 truk berkapasitas 10 ton gabah ke perusahaan.

"Kalau sekali antar mereka untung Rp 500.000, tinggal

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-3)

Title	Upaya Bertahan Hidup dengan Produksi Beras Ketan	
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	1 Part 2	
Author	J Galuh Bimantara/Melati Mewangi/Stefanus Ato/Fajar Ramadhan/Harry Susilo	

Upaya Bertahan Hidup

[Sambungan dari halaman 1]

dikalikan berapa kali antar dalam sehari. Bahkan, ada yang sehari bisa kirim 15 truk,” kata Puji.

Hal ini membuat Puji kesulitan mendapatkan gabah dengan harga yang kompetitif. Seperti pada akhir Maret 2024, dia bahkan harus mencari gabah hingga ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang jaraknya sekitar 50 kilometer dari rumahnya.

Karena situasi yang tidak menentu, Puji saat ini hanya fokus menggiling gabah menjadi beras pecah kulit (PK). Alasannya, ia tidak perlu mengeluarkan ongkos penggilingan yang lebih besar jika menggiling beras konsumsi. Baginya, memproduksi beras PK ada kepastian pasar karena ia bermitra dengan penggilingan lain.

Setelah selesai menggiling, ia mendistribusikan beras PK ke penggilingan padi skala menengah atau penggilingan

besar. Proses itu kini dilakukan menggunakan alat penggilingan padi di rumah ibunya yang berkapasitas lebih kecil.

Hibernasi

Saat tak kuat modal untuk pengadaan bahan baku, maka hibernasi atau berhenti operasi dalam jangka waktu tertentu jadi strategi umum penggilingan padi menyambung napas. Di satu kompleks penggilingan padi, di Desa Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, belasan pekerja menjemur gabah di bawah siraman sinar matahari, pertengahan Maret lalu.

Denyut aktivitas itu menandai mulai hidupnya lagi pabrik beras milik Warsim tersebut setelah “tertudur” tiga bulan. Penggilingan bernama Cinta Tani Jaya itu non-aktif pada Desember 2023 hingga Februari 2024.

Warsim urung mendapatkan bahan baku pada periode tersebut lantaran gabah su-

dah habis di petani. Jika ada, harganya amat tidak terjangkau. Gabah kering giling (GKG) sempat dihargai Rp 10.000 per kilogram.


Menurut Warsim, penggilingan di sekitar dia menerapkan cara serupa. Hanya penggilingan bermodal besar yang bisa terus memproduksi.

Selain karena mampu menyerap gabah kala harga mencekik, penggilingan besar juga mampu menyimpan gabah dalam jumlah sangat banyak agar ada stok yang bisa digiling sewaktu paceklik.

Penggilingan milik Ratnadi, Puji, dan Warsim memang seperti hidup segan mati tak mau karena tak kuasa bersaing dalam menyerap gabah petani.

Ibarat David melawan Goliath, penggilingan kecil ini kalah hampir di segala aspek dibandingkan dengan produsen beras raksasa di negeri ini. Mereka menunggu keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil di perdesaan.

(JOG/MEL/VAN/FRD/ILO)

Title	Usaha Tani Padi yang Rusak	
Date	12 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	6	
Author	Kompas	

Usaha Tani Padi yang Rusak



dakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah.

Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Kendati begitu, pemerintah tidak boleh lengah lantaran harga beras berpotensi naik lagi akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kilogram (kg). Harga beras tersebut turun 0,91 persen dibandingkan dengan harga rerata pada Mei 2024 yang sebesar Rp 15.263 per kg (*Kompas*, 11/6/2024).


Fenomena naik-turun harga seperti di atas boleh dibilang tidak lagi menguntungkan petani. Petani tak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung. Mereka cenderung langsung menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menjaga harga, yaitu menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibandingkan dengan instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal.

Pengendalian harga hanyalah satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, maka nilai tambah dari usaha tani padi tak lagi beredar di desa. Nilai tambah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Belum lagi jika kita menengok kenyataan penggilingan padi banyak yang tak beroperasi. Keadaan ini makin memperjelas perputaran uang di desa makin berkurang.

Kita kemudian menengok penerima manfaat subsidi. Se-jauh mana petani menerima pupuk dan benih bersubsidi? Harian ini pernah melakukan investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga pengucuran pupuk bersubsidi kemungkinan sudah bermasalah. Elite-elite di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu tepat.

Apabila kita rinci lebih lanjut, kita akan mendapatkan usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang makin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang makin tak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total.

Padi masih menjadi bahan makanan pokok penduduk negeri ini. Oleh karena itu, perbaikan secara radikal perlu dilakukan agar pertanian padi menjadi kokoh dan bisa menopang kebutuhan pangan masa depan, selain melakukan diversifikasi pangan. Tanpa kerja keras secara menyeluruh di sektor pertanian padi, maka kita sulit mengandalkan pasokan pangan dari dalam negeri.

Title	Hadapi Kemarau, Kementan Alihkan Anggaran Rp 7 Triliun	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	B1/IDTV	

Hadapi Kemarau, Kementan Alihkan Anggaran Rp 7 Triliun

JAKARTA, ID—Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pengalihan (*refocusing*) anggaran Rp 7 triliun untuk membantu para petani menghadapi kemarau akibat El Nino di tiga bulan masa kritis, yakni Agustus, September, dan Oktober, tahun ini. *Refocusing* dilakukan dengan mengalihkan anggaran untuk bangunan, perjalanan dinas, dan seminar men-


jadi bagi pengadaan pompa, benih, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). "Anggaran yang tidak memberi dampak signifikan sebesar Rp 7 triliun kami alihkan atau pindahkan ke yang bisa memacu produksi pangan strategis," ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/06/2024).

Mentan menjelaskan, anggaran tersebut dialihkan untuk pembelian pompa, benih, dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produksi komoditas pangan strategis. "Yang dulu untuk bangunan, sebagian perjalanan dinas, seminar, biaya tidak penting, kami cabut. *Refocusing*, kemudian kami belikan benih,

pompa, alsintan, untuk petani, dan apa yang dibutuhkan petani, sehingga produksinya bisa naik," jelas Amran. Upaya itu difokuskan di Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lalu Lampung, Sumsel, Sulsel, Kalteng. "Kami fokuskan di sentra produksi padi dan harus ada air sepanjang musim dan sepanjang tahun," tandas Amran.

Refocusing anggaran telah dilakukan sejak Maret 2024, di antaranya dengan target pemasangan 25 ribu unit pompa hingga Agustus 2024. Pompa-pompa itu akan dipasang di wilayah yang memiliki sumber air di sepanjang tahun, seperti titik-titik sekitar Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Cimanuk, dan lainnya. "Sekarang ini, realisasi

pompa sudah 70%, masih ada 30% (yang belum terealisasi). Mudah-mudahan ini, kalau terpasang semua akan ada 25 ribu pompa. Yang kalau kita pasang semua, mudah-mudahan bisa memitigasi risiko kekeringan. Jadi, Presiden (Joko Widodo) perintahkan segera selesaikan yang 30%, sebelum Agustus semoga bisa selesai," ujar Amran. **(B1/IDTV)**

Title	Hilirisasi Sawit Sukses Porsi Ekspor CPO Tinggal 10%	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Tri Listiyarini	

Hilirisasi Sawit Sukses, Porsi Ekspor CPO Tinggal 10%

JAKARTA, ID—Hilirisasi sawit nasional telah berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari porsi ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) yang tinggal 10-11% pada 2023, sedangkan 89-90% lainnya berupa produk olahan. Ke depan, hilirisasi sawit di Tanah Air perlu diarahkan ke fase selanjutnya, yakni porsi ekspor produk akhir yang bernilai jual tinggi lebih dominan, sehingga efek penghiliran ke setoran devisa dan petani makin besar.

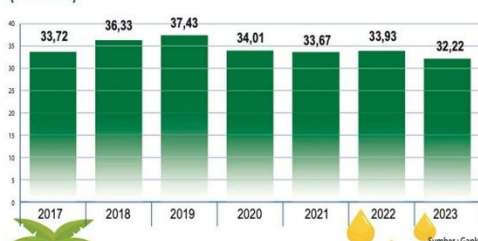
Oleh Tri Listiyarini

Merujuk data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor minyak sawit nasional 2020 mencapai 33,56 juta ton dengan porsi CPO sebesar 7,17 juta ton (21,36%). Lalu, ekspor minyak sawit Indonesia di 2021 menembus 33,12 juta ton dengan porsi CPO sebanyak 2,48 juta ton (7,49%), 2022 sekitar 31,91 juta ton dengan porsi 3,49 juta ton berupa CPO (10,96%), dan 2023 mencapai 32,22 juta ton dengan porsi 3,26 juta ton berbentuk CPO (10,13%). Di Januari-Februari 2024, ekspor minyak sawit RI sekitar 4,98 juta ton, porsi CPO 520 ribu ton (10,45%).

PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) memperkuat data tersebut. Ekspor sawit Indonesia pada 2011 terdiri atas 52% produk mentah (CPO dan *crude palm kernel oil*/CPKO), 41% produk olahan (*refined palm oil*/RPO dan *refined palm kernel oil*/RPKO), dan 7% produk jadi berbasis minyak sawit (oleokimia dan biodiesel). Namun demikian, di 2023, porsi ekspor yang berupa produk mentah telah melorot menjadi tinggal 11%, sedangkan lainnya berupa produk olahan dan produk jadi berbasis minyak sawit yang masing-masing meningkat menjadi 75% dan 14%.

Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayang mengatakan, hilirisasi sawit nasional telah dimulai sejak 2011 yang ditandai dengan pengenaan bea keluar (BK) untuk ekspor CPO dan produk turunannya. Sejak saat itu hingga saat ini, hilirisasi sawit di RI berlangsung melalui tiga jalur, yakni *oleofood complex*, *oleochemical complex*, dan *biofuel complex*. "Ada tiga jalur hilirisasi yang

Ekspor Minyak Sawit Indonesia (Juta Ton)



sedang berlangsung di Indonesia sejak 2011, yakni *oleofood complex* yang mengubah minyak sawit jadi bahan pangan termasuk minyak goreng dan produk-produk *specialty fat*, *oleochemical complex* dengan produk *biolubricant*, dan *biofuel complex* itu jalur energi," papar Tungkot, baru-baru ini.

Dalam 10 tahun lebih hilirisasi itu berjalan, implementasinya cukup berhasil. Hal itu ditandai dengan ekspor CPO yang di 2011 masih 52% tapi pada 2023 tinggal 11%. "Ekspor olahan berupa produk hilir sudah 75% di 2023. Artinya apa, hilirisasi kita berhasil," ungkap Tungkot. Hanya saja, Tungkot menilai, hilirisasi

melalui tiga jalur yang dijalankan Indonesia itu masih relatif dangkal. "Jangan berhenti di situ, ke depan harus didorong agar ekspornya punya *high value added*. Sekarang harga produknya kalau diekspor masih di level US\$ 800-1.500 per ton, nanti harus yang bisa US\$ 5.000 per ton. Dengan hilirisasi lebih jauh, tidak mustahil sawit menyumbang US\$ 100 miliar per tahun," tandas dia.

Pemimpin Industri

Melalui hilirisasi, sejatinya Indonesia sudah mampu memimpin pasar minyak sawit dan minyak nabati dunia. Dalam pantauan Paspi, sejak 2018,

Pemerintah RI telah menjalankan tiga instrumen guna memacu kemampuan Indonesia dalam memengaruhi pasar minyak sawit dan nabati dunia, yakni hilirisasi, *mandatory biodiesel*, dan pungutan ekspor (*levy*). "Tiga instrumen itu, termasuk hilirisasi, menjadi senjata RI dalam memengaruhi pasar minyak sawit dunia. Dalam pengamatan kami, selama 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil menjadi *influencer* dunia, analisa dunia akan pasar sawit dan minyak nabati mereferensi Indonesia, berupa *mandatory biodieselnnya*, berapa *levy*-nya. Jadi, tanpa kita sadari, Indonesia sudah menjadi *game changer* industri sawit dunia," kata Tungkot.

Sedangkan Ketua Umum Gapki Eddy Martono menuturkan, volume ekspor minyak sawit Indonesia cenderung dalam tren menurun karena pertumbuhan ekonomi negara pengimpor yang kurang baik dan suplai minyak nabati lain yang meningkat. Namun kabar baiknya adalah ekspor produk sawit nasional mayoritas sudah berbentuk olahan. "Kami sampaikan bahwa ekspor produk sawit kita sudah didominasi oleh produk hilir. Jadi, ekspor kita itu sebenarnya sudah didominasi produk olahan, mayoritas bukan CPO lagi tapi sudah olahan," ujar Eddy.


Saat CNBC Indonesia Special Dialogue 2024 dengan tema Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Melalui Hilirisasi pada 6 Juni 2024, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyarankan, hilirisasi sawit RI harus diarahkan ke produk bernilai tambah tinggi (*high value added*) yang harganya jauh lebih mahal. Salah satu tujuannya agar hilirisasi juga bisa mengangkat harga tandan buah segar (TBS) sawit petani, setidaknya sampai Rp 6.000

per kilogram (kg) dari rata-rata saat ini Rp 2.000 per kg. "Kita harus bisa hasilkan produk turunan yang harga ekspornya US\$ 3.000-4.000 per ton, seperti kosmetik, deterjen, cat, farmasi, dan *propylene*," jelas dia.

Hindari Gejolak Harga

Pada bagian lain, Kementerian Pertanian (Kementan) turut mendorong agar hilirisasi sawit nasional terus dipacu dan produknya dijual di pasar dalam negeri. Dengan begitu, ke depan, sawit Indonesia tidak akan tergantung ekspor dan terhindar dari gejolak harga di pasar internasional. Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dengan hilirisasi, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada harga sawit dunia karena nantinya bisa melakukan produksi sampai hilirisasi dari dalam negeri. Sementara itu, produk olahan yang dibuat dari hilirisasi itu dapat dipasarkan melalui berbagai pasar domestik. "Sehingga, bagi kita, kalau (harga) minyak sawit dunia turun, tentu tidak akan ada masalah karena kita bisa jadikan produk olahan ini dipasarkan di dalam negeri," jelas Mentan dalam keterangannya.

Karena itu, Mentan menargetkan Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat mampu menjadi contoh terbaik dalam pengembangan hilirisasi sawit, terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor. Hal itu mengingat Papua adalah daerah strategis karena memiliki lahan sangat luas. "Kalau mau hilirisasi harusnya lahan yang disiapkan 100-200 ribu hektare (ha). Dan kalau itu yang disiapkan, kita bisa sampai mengolah minyak goreng. Seperti itulah kita berpikir, harus menuju ke sana supaya tidak bergantung pada impor," jelas kata Mentan.

Title	Luhut: Bulog akan Akuisisi Sumber Beras di Kamboja	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

Luhut: Bulog akan Akuisisi Sumber Beras di Kamboja

JAKARTA, ID—Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Perum Bulog akan melakukan akuisisi sumber beras di Kamboja. Akuisisi tersebut dilakukan atas perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti. Dan memang sudah ditindaklanjuti, sekarang tinggal kita melakukan *due diligence*,” jelas Menko Luhut di sela menghadiri HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin (10/06/2024).

Meski begitu Luhut tidak menjelaskan secara rinci mengenai akuisisi Perum Bulog di Kamboja tersebut. Selain Bulog, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah juga bakal melakukan ekspansi bisnis bagi unit BUMN lain yaitu PT Pertamina. Pertamina akan melakukan akuisisi perusahaan


asal Brasil untuk gula dan etanol. Ekspansi bisnis itu akan mengubah bahan bakar minyak (BBM) dengan bioetanol. Hal itu akan dilakukan bertahap demi menekan polusi udara di Indonesia terutama di Jakarta. “Rencana pemerintah mengganti BBM dengan bioetanol ditargetkan bisa tercapai dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” papar Luhut seperti dikutip dari *Antara*.

Sedangkan Presiden Jokowi mengatakan, rencana Bulog dan Pertamina ekspansi ke luar negeri masing-masing ke Kamboja dan Brasil merupakan hal biasa demi kepentingan proses bisnis. Ekspansi Bulog ke Kamboja demi memastikan stok cadangan beras RI aman. “Itu proses bisnis yang akan dilakukan Bulog guna memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi stok yang aman, daripada beli lebih bagus investasi,” kata Presiden.

Harga Beras

Pada bagian lain, Direktur Utama Perum Bulog menyatakan, intervensi harga melalui penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terus dilakukan masif setelah sebelumnya saat panen raya dikurangi intensitasnya. Per 7 Juni 2024, realisasi distribusi beras SPHP mencapai 752.266 ton atau 62,69% dari target sepanjang tahun ini 1,2 juta ton. “Kemarin waktu puncak panen raya, kami agak melambatkan penyaluran beras SPHP karena mengikuti dinamika dari situasi panen. Tapi kalau kami melihat proyeksi ke depan tampaknya SPHP ini akan kembali menjadi andalan (intervensi harga) pada bulan-bulan ke depan,” papar Bayu.

Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/ NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, harga beras medium di produsen kini masih 5,91% di atas harga pembelian pemerintah (HPP). **(tl)**


Title	Peresmian Rice Milling AB2TI	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Ant	



ANT

Peresmian Rice Milling AB2TI

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah) didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kanan) melihat beras hasil penggilingan usai peresmian Rice milling milik Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di desa Kalensari, Widasari, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024). Menkop berharap penggilingan padi tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi petani setempat.

Title	Krisis Pangan saat Puncak Kemarau di Depan Mata	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	7	
Author	Try/AD/JS/RF/J-3	

Krisis Pangan saat Puncak Kemarau di Depan Mata

MENTERI Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi pangan di Tanah Air. Terlebih tiga bulan puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus, September, Oktober, kata Amran, menjadi musim kritis untuk produksi pangan.

“Kondisi sekarang ini adalah iklim yang tidak menentu, sekarang El Nino masih berlangsung. Mudah-mudahan pada Juli dan Agustus, El Nino selesai,” kata Amran, usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Langkah yang bisa dikerahkan oleh Kementerian Pertanian, antara lain melalui pompanisasi sebagai solusi cepat guna menghadapi kondisi lahan pertanian yang mengering akibat El Nino.

“Kami laporkan, kami sudah *refocusing* (pengalihan fokus) anggaran untuk membeli pompa, yang sebelumnya diperuntukkan untuk bangunan, untuk sebagian perjalanan dinas, acara seminar. Kemudian biaya tak penting, kami cabut dulu, kami *refocusing*. Kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani,” kata Amran.

Sementara itu, lahan pertanian seluas 2.000 hektare di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Garut, dan Pangandaran, gagal panen terserang wereng batang coklat, tikus, dan burung pipit. Akibat hal tersebut petani diprediksi akan mengalami kerugian hingga Rp30 miliar.

“Serangan hama wereng batang coklat (WBC) dan burung pipit terjadi secara masif di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran. Akan tetapi, untuk serangan hama tikus dan burung pipit

terjadi di wilayah Kabupaten Garut membuat banyak petani harus menelan kerugian di usia masa panen,” kata Ketua DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia wilayah Jawa Barat (Jabar), Yuyun Suyud, kemarin.

“Hari Senin (10/6), kami mulai melaksanakan *droping air* ke tiga desa di daerah lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten.”


Syahrana

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Klaten

Di sisi lain, warga di lereng Gunung Merapi mulai mengajukan permintaan bantuan air bersih di awal musim kemarau ini. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan akibat kemarau ini.

“Hari Senin (10/6), kami mulai melaksanakan *droping air* ke tiga desa di daerah lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahrana.


Tiga desa yang mulai mengalami kekeringan dan bantuan air bersih, yaitu Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, dan Desa Tologowatu. Total bantuan air ke tiga desa itu delapan tangki masing-masing berkapasitas 5.000 liter. (Try/AD/JS/RF/J-3)

Title	UPAYA MEMBASMI HAMA TIKUS	
Date	12 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	2	
Author	Antara/Muhammad Mada	



ANTARA/MUHAMMAD MADA

UPAYA MEMBASMI HAMA TIKUS: Petani mencangkul sawah di Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, kemarin. Petani setempat memasang jebakan aliran listrik untuk membasmi hama tikus sawah demi menghindari gagal panen.

Title	Vaksindo Resmikan Pabrik Vaksin untuk Kemandirian Vietnam dan ASEAN	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	3	
Author	Yan	

Vaksindo Resmikan Pabrik Vaksin untuk Kemandirian Vietnam dan ASEAN

VAKSINDO Vietnam Company Limited (Vaksindo Vietnam), anak perusahaan Vaksindo Satwa Nusantara di Indonesia, secara resmi membuka pabrik vaksin hewan ternak termutakhir, Minggu (9/6) di Taman Industri Yen My II, Distrik Yen My, Provinsi Hung Yen.

Pabrik vaksin veteriner terbesar di Vietnam itu dibangun untuk memasok vaksin berkualitas tinggi secara domestik dan mengekspornya ke negara-negara lain di kawasan Asia dan sekitarnya.

Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Mr. Phung Duc Tien; bersama Dubes RI untuk Vietnam, Denny Abdi; dan Wakil Gubernur Provinsi Hung Yen, Mr. Nguyen Hung Nam; turut hadir dalam peresmian VVAH (Vaksindo Vietnam Animal Health) sekaligus mengunjungi fasilitas pabrik bersama pimpinan JAPFA Group, dan Vaksindo Indonesia.

Dubes Denny menekankan bahwa Vietnam dan Indonesia adalah dua negara yang berperan penting dalam keamanan pangan regional, karena populasi yang besar dan terus berkembang. "Melalui pabrik ini, saya yakin bahwa penelitian antara Indonesia dan Vietnam di bidang



DOK VAKSINDO

kesehatan hewan dapat terus diperkuat, sehingga kita dapat menekan potensi epidemi di masa depan," ungkap Dubes Denny.


Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Phung Duc Tien menyatakan saat ini, pabrik vaksin domestik yang memenuhi standar GMP hanya memenuhi sekitar 70% dari permintaan. "Peresmian pabrik vaksin Vaksindo Vietnam adalah peristiwa penting, dalam konteks meningkatnya permintaan akan vaksin," kata Phung Duc Tien.

Pabrik VVAH dibangun sejak April 2022 di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dan memiliki desain dua lantai dengan rencana perluasan di masa depan. VVAH telah memiliki standar GMP-WHO,

dan menerapkan teknologi terkini untuk memenuhi standar internasional.

Pabrik ini akan mengoperasikan lima lini produksi, dengan fokus pada vaksin berbasis Kultur Jaringan, vaksin berbasis Telur, dan vaksin Bakteri. Produk utamanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyakit untuk babi, sapi, dan unggas.

Teguh Prajitno, Head of SBU Animal Health and Live Equipment JAPFA mengatakan bahwa sejak 2010, Vaksindo telah menjadi mitra pemerintah Indonesia dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan yang berkaitan dengan FAO dan OFFLU di Asia Tenggara. "Kami selalu bertekad untuk mengembangkan solusi tepat sasaran untuk menghadapi tantangan penyakit," tambah Teguh. (Yan)

Title	Waspadai Penyakit Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	7	
Author	Heri Susetyo	

Waspadai Penyakit Hewan Kurban

Saat sidak, petugas mendapati tiga ekor sapi di Lingkar Timur Sidoarjo menunjukkan ciri PMK, seperti keluar air liur berlebihan dari mulut, hidung, dan mulut terluka, serta nafsu makan yang berkurang.

HERI SUSETYO

heri_susetyo@mediaindonesia.com

SEJUMLAH sapi yang diperdagangkan untuk kurban di sejumlah lokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terjangkit virus penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal itu diketahui saat Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) kemarin.

Saat sidak, petugas mendapati tiga ekor sapi di Lingkar Timur Sidoarjo menunjukkan ciri PMK, seperti keluar air liur berlebihan dari mulut, hidung, dan mulut terluka, serta nafsu makan yang berkurang.

Petugas kemudian memberikan suntikan antibiotik untuk *supporting therapy* dan memberikan vitamin agar nafsu makan sapi meningkat.

"Diharapkan saat Hari Raya Idul Adha nanti sapi yang terjangkit virus PMK sudah pulih kembali," kata Kabid Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Toni Hartono. Sementara itu, sidak akan

terus dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo hingga H-1 Hari Raya Idul Adha.

Bukan hanya pada sapi, penyakit juga ditemukan pada kambing yang diperdagangkan untuk kurban di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Salah satu peternak, Abdul Aziz, mengatakan 23 ekor kambing yang diternaknya tiba-tiba menderita penyakit mata sejak sepekan lalu.

Alih-alih mereguk untung pada Idul Adha tahun ini, ia justru memprediksi bakal mengalami kerugian. Pasalnya, kambing-kambingnya kini tidak bisa dijual akibat penyakit mata tersebut. Menurut Aziz, ciri-ciri penyakit mata yang menyerang kambingnya berawal dari mata yang berair kemudian memerah.

"Saya juga tidak tahu penyebabnya. Awalnya, empat kambing yang sakit mata, berselang dua hari sudah 10 kambing yang terjangkit. Sekarang sudah ada 23 ekor yang kena," terangnya kepada *Media Indonesia* di kawasan peternakan kambing Gawalise, Palu, kemarin.

Tidak layak

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menemukan 125 hewan dinyatakan tidak layak kurban sesuai melakukan pemeriksaan terhadap ratusan hewan kurban. Ratusan hewan kurban tak layak tersebut disebabkan faktor usia yang belum memenuhi syarat.

Ketua Tim Kerja Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Budiono mengatakan pemeriksaan hewan kurban di

wilayahnya sudah mendata sekitar 554 ekor dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat kembali. Itu disebabkan pada tahun ini penjualan sapi, domba, dan kambing mulai ada peningkatan dan dipastikan meningkat pada H-10.

Hewan kurban tidak layak jual juga ditemukan di Kota Bandung. Dari data yang didapat, rata-rata hewan kurban yang tidak layak dikurbankan tersebut dalam keadaan sakit dan tidak cukup usia.


"Dari data yang kami miliki, jumlah hewan kurban yang sakit sekitar 150 ekor dan 400 ekor lainnya belum cukup usianya. Untuk hewan yang sakit, kami minta kepada pedagang untuk dipisahkan," ujar Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Wilsandi.

Selain upaya pemeriksaan, pemberian vaksin kepada hewan kurban juga dilakukan guna memastikan keamanan hewan tersebut. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Bengkulu M Syarkawi mengatakan sebanyak 15 ribu hewan ternak telah divaksin menjelang Idul Adha guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang membeli hewan kurban.

"15 ribu hewan ternak yang berada di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah divaksin," katanya. Selain melakukan vaksinasi, lanjut dia, disnakeswan juga memeriksa kesehatan seluruh hewan ternak guna memastikan kelayakan hewan kurban dari kesehatan hingga kesesuaian dengan syariat Islam. (TB/AD/AN/DG/MY/LD/YK/SS/UL/J-3)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Wilmar Distribusikan 1.012 Hewan Kurban Kepada Masyarakat	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	5	
Author	Media Indonesia	

Wilmar Distribusikan 1.012 Hewan Kurban Kepada Masyarakat

BERTEPATAN dengan datangnya Idul Adha, Wilmar akan mendistribusikan 1.012 hewan kurban, yang terdiri dari 505 sapi dan 507 kambing di sekitar wilayah operasionalnya di Indonesia.

Hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, yaitu melalui pemerintah desa, masjid/musholla, lembaga swadaya masyarakat (LSM), panti asuhan, tokoh dan komunitas. Hal itu dimaksudkan agar lebih banyak melibatkan masyarakat.

Menurut Human Capital Head Wilmar Erlina Panitri, kurban merupakan kegiatan tahunan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab


sosial perusahaan (*corporate social responsibility/ CSR*). Langkah tersebut sejalan dengan misi perusahaan yang lebih luas, yaitu berkontribusi positif kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah operasional. “Perusahaan berharap dapat merayakan esensi Idul Adha dengan berbagi kepada masyarakat,” kata Erlina melalui keterangan resmi (12/6).

Wilayah penyerahan hewan kurban di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut meliputi Region Sumatera Barat, Region Sumatera Selatan, Bengkulu, Region Sumatera Utara, Bangko, Batam, Region Riau, Pulo Gadung, Cikarang, Serang,

Ngawi, Gresik, Mojokerto, Region Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Balikpapan, Banjarmasin, Luwuk, Bitung dan Loa Duri.

Erlina menambahkan, Idul Adha bukan hanya tentang ritual kurban, tetapi juga mengenai mewujudkan nilai-nilai kepedulian, solidaritas, dan berbagi dengan sesama. Pihaknya berharap, melalui program yang bersentuhan dengan warga dapat memperkuat ikatan antara perusahaan dan masyarakat. “Kami terinspirasi untuk terus mengimplementasikannya agar dalam setiap operasional kami, masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata dia.



Title	Alokasikan Rp 7 T untuk Beli Mesin Pompa	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Jawa Pos	
Page	7	
Author	Lyn/c6/ttg	

Alokasikan Rp 7 T untuk Beli Mesin Pompa

Khawatir Agustus–Oktober
Kekeringan dan Ganggu Pertanian

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 7 triliun untuk membeli mesin pompa air guna mitigasi kekeringan. El Nino yang belum berakhir dan masuknya musim kemarau menjadi kekhawatiran adanya kekeringan di berbagai daerah sehingga akan memengaruhi produksi beras dalam negeri.

Kemarin (11/6) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dipanggil Presiden Joko Widodo. Kepala negara

ingin mengetahui kondisi pangan dalam negeri. Musim tidak menentu menyebabkan produktivitas tanaman turun.

"Sekarang masih posisi iklim El Nino berlangsung. Mudah-mudahan Juli–Agustus El Nino selesai," kata Amran.

El Nino belum selesai, namun sudah masuk musim kemarau. Puncaknya akan terjadi sekitar Agustus hingga Oktober. Tiga bulan ini menjadi bulan rawan.

Amran menyebut Jokowi


minta adanya solusi. "Kami sudah lakukan sejak Maret. Solusi cepat untuk tangani kondisi El Nino dan kekeringan ini adalah pompanisasi," katanya. Dengan latar belakang ini, Kementerian Pertanian akan melakukan *refocusing* anggaran untuk membeli pompa air. "Sebagian perjalanan dinas, acara seminar, kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian

untuk petani," imbuhnya.

Targetnya, ada 25 ribu pompa yang terpasang. Kini baru 70 persen yang sudah realisasi. Jokowi, menurut Amran, minta agar sebelum Agustus semua selesai. "Rp 7 triliun. Jadi, semua anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan pada produksi padi, jagung, dan komoditas strategis kami pindahkan," ujarnya ketika ditanya berapa anggaran yang disiapkan.

Yang menjadi fokus pemerintah adalah Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Menurut dia, dengan pompanisasi, debit air sungai itu akan menjadi solusi cepat dalam mengatasi kekeringan. "Kalau kita melakukan pompa bisa langsung tanam, tapi kalau cetak sawah itu butuh waktu 1 sampai 3 tahun. Sementara kita butuh pangan sekarang dan negara lain juga sedang kekurangan pangan," ujarnya. (lyn/c6/ttg)

Title	Dandim 0802 Serahkan Bantuan Pompa Air Brigade Kepada Para Petani	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Pojok Kiri	
Page	3	
Author	Sul	



Dandim 0802 Serahkan Bantuan Pompa Air Brigade Kepada Para Petani

Ponorogo, Pojok Kiri

Komandan Kodim 0802/Ponorogo Letkol Inf Dwi Soerjono hari ini menyerahkan bantuan Alsintan Pompa Air Brigade kepada Kelompok Tani (Poktan) se Kabupaten Ponorogo, Jumat (07/06/2024).

Penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani berjumlah 60 orang yang bertempat di halaman belakang Makodim 0802/Ponorogo tersebut dihadiri antara lain : Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Ponorogo Tamar Mahara,

STP, MMA, Kabid Tanaman Holtikultura Kabupaten Ponorogo Tri Budi.

Selanjutnya Pasi Ter Kodim 0802/Ponorogo Kapten Arm Sutami Pena; Kordinator PPL Kec Jenangan, Babadan, Siman, Kauman, Sukorejo, Sampung dan Jenangan; PPL Kecamatan se Kabupaten Ponorogo; para Babinsa Pendamping serta perwakilan Kelompok Tani penerima bantuan.

Terkait bantuan Alsintan Pompa Air Brigade tersebut, baik Dandim 0802/Ponorogo maupun Kabid Prasarana dan

Sarana Pertanian Kabupaten Ponorogo menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya dan bentuk Komitmen Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat khususnya para petani agar semakin maju, mandiri dan modern guna mewujudkan Swasembada Pangan Nasional.

"Brigade Alsintan Kodim 0802/Ponorogo menerima sebanyak 60 unit Pompa Air yang hari ini kami serahkan langsung kepada para petani di wilayah Kabupaten Ponorogo," kata Dandim 0802/Ponorogo.

"Tentu kami sangat berkomitmen untuk terus mendukung dan meyukskan Program Pemerintah terkait Ketahanan Pangan Nasional. Dan semoga bantuan Pompa Air ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada petani terutama dalam meningkatkan hasil pertanian," jelas Letkol Inf Dwi Soerjono.

Sementara Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Ponorogo dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Ponorogo, selain bantuan Pompa

Air juga ada program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang mana semua itu untuk membantu para petani agar tidak kekurangan kebutuhan akan air terutama untuk padi yang memang membutuhkan air yang berkecukupan.


"Jadi selain ada bantuan perpompaan, kita juga ada irigasi perpompaan yang nota benanya mirip dengan yang ada di Kabupaten yaitu Program Sumur Dalam. Insyallah ini bisa memberikan solusi kepada masyarakat terutama para petani agar tidak kekurangan kebutuhan air," katanya.

Rasa senang dan bangga tentu dirasakan Sunyoto (Ketua Poktan Tani Maju) Desa Pengkol Kecamatan Kauman yang mewakili para petani di Kabupaten Ponorogo karena adanya bantuan tersebut benar-benar sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari dalam bercocok tanam terutama padi.

"Terima kasih kepada Kementan Republik Indonesia dan Kodim 0802/Ponorogo yang mana pagi ini kami menerima bantuan Alsintan berupa Pompa Air dan mudah mudahan ini bermanfaat bagi kami semua dalam membantu para petani pada lingkungan

persawahan kami," ujarnya penuh bangga.

Bukan hanya penyerahan bantuan Alsintan saja, sebagai bentuk keseriusan Kodim 0802/Ponorogo dalam mendukung dan meyukskan Program Komando Atas dan Pemerintah terutama terkait Program Pompanisasi, Dandim 0802/Ponorogo tidak henti melakukan berbagai upaya termasuk kemarin langsung terjun ke lapangan mengecek lokasi Pompanisasi di berbagai wilayah termasuk di Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. (sul)

Title	Alokasikan Rp7 T untuk Beli Mesin Pompa	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Batam Pos	
Page	3	
Author	JP Group & Galih Adi Saputro	

Alokasikan Rp7 T untuk Beli Mesin Pompa

Mesin Pompa

Khawatir Agustus-Oktober Kekeringan dan Ganggu Pertanian

Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO

JAKARTA (BP) - Pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk membeli mesin pompa air guna memitigasi kekeringan. El Nino yang belum berakhir dan masuknya musim kemarau menjadi kekhawatiran adanya kekeringan di berbagai daerah. Sehingga akan memengaruhi produksi beras dalam negeri.

Selasa (11/6) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di-panggil Presiden Joko Widodo. Kepala Negara ingin mengetahui kondisi pangan dalam negeri. Musim tidak menentu menyebabkan produktivitas tanaman turun. "Sekarang masih posisi iklim El Nino berlangsung. Mudah-mudahan Juli-Agustus El-Nino selesai," katanya.

El Nino belum usai namun sudah masuk musim kemarau. Puncaknya akan terjadi sekitar Agustus hingga Oktober. Tiga bulan ini menjadi bulan rawan. Amran menyebut Jokowi minta ada solusi. "Kami sudah lakukan sejak Maret. Solusi cepat untuk tangani kondisi El-Nino dan kekeringan ini adalah pompa-nisasi," katanya. Dengan latar-belakang ini maka Kementerian



F. RADAR BEKASI/JPG

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan panen bawang merah di lahan *urban farming* Korem 051/WKT Dewa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Selasa (11/6).

Pertanian akan melakukan *refocusing* anggaran untuk membeli pompa air. "Sebagian perjalanan dinas, acara seminar, kemudian biaya tak penting dulu kami cabut. Kami *refocusing* kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani," imbuhnya.

Targetnya ada 25 ribu pompa yang terpasang. Kini baru 70 persen yang sudah realisasi. Jokowi menurut Amran minta agar sebelum Agustus semua selesai. "Rp7 triliun. Jadi semua anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan pada produksi padi, jagung, dan komoditas strategis, kami pindahkan," ujarnya

ketika ditanya berapa anggaran yang disiapkan.

Yang menjadi fokus pemerintah ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurutnya dengan pompanisasi debit air sungai ini akan menjadi solusi cepat dalam mengatasi kekeringan. "Kalau kita melakukan pompa bisa langsung tanam, tapi kalau cetak sawah itu butuh waktu 1 sampai 3 tahun. Sementara kita butuh pangan sekarang dan juga negara lain juga *short-age* mereka kekurangan pangan," ujarnya. (*)

Title	Disnakeswan NTB Turunkan Tim Cek Kesehatan Hewan Kurban
Date	12 Juni 2024
Media	Radar Lombok
Page	2
Author	Rie



Kementerian Pertanian

Disnakeswan NTB Turunkan Tim Cek Kesehatan Hewan Kurban

MATARAM - Untuk memastikan daging hewan kurban layak dikonsumsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB membentuk tim pemeriksa, terdiri dari dokter hewan, akademisi dan internal dinas.

"Segera kita jadwalkan penguasaan mereka," terang Kepala Disnakeswan NTB Muhamad Riadi, Selasa (11/6).

Tim yang dibentuk akan bertugas di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sementara di kabupaten/kota lain di NTB, juga melakukan hal serupa. Sesuai tugas dan fungsinya, tim akan memeriksa seluruh kesehatan fisik hewan kurban.



NASRI/RADAR LOMBOK

HEWAN : Untuk memastikan hewan kurban layak konsumsi, Disnakeswan NTB turunkan tim pemeriksa.

Kemudian pemeriksaan kesehatan juga dilakukan pada saat penyembelihan hewan kurban, terutama di bagian hati. Apakah ditemukan penyakit cacing hati atau yang sering dikenal Fasciola Hepatica, sehingga tugas tim tersebut akan berlangsung hingga H+3 lebaran Idul Adha.

"Tim tetap turun, supaya hewan ini dinyatakan sehat dan dagingnya sehat dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, jadi kami harus memastikan hewan kurban

ini tidak terkena penyakit seperti PMK, antraks atau penyakit kulit, intinya hewan-hewan ini harus sehat," tegasnya.

Kendati demikian, tidak semua lokasi penjualan hewan kurban akan diperiksa oleh tim kesehatan, artinya dilakukan sampling karena keterbatasan anggota. Namun yang pasti, mereka akan bekerja di titik di mana jumlah hewan kurban paling banyak.

Begitu juga pada saat penyembelihan hewan kurban, tim akan

mengunjungi masjid atau musala yang halamannya dijadikan tempat pemotongan sekaligus pembagian hewan kurban dalam jumlah banyak.

"Itu semua akan kita periksa," jelasnya.

Dalam Islam, hewan kurban harus memenuhi syarat, yaitu harus memenuhi usia minimal sesuai syariat, dalam keadaan sehat saat disembelih, dan tidak cacat. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 tahun 2014.

"Syarat hewan kurban itu harus sehat, karena kalau dia sakit berarti dia cacat sehingga tidak memenuhi syarat menjadi hewan kurban," terang dia.

Kemudian pada saat pemotongan, apabila ditemukan cacing hati, tim akan memberi warning ke masyarakat. Karenanya, Riadi memperingatkan kepada para pengusaha hewan kurban, jangan mencoba menjual hewan ternak sakit atau cacat, apalagi ini untuk keperluan ibadah, karena jelas tidak sesuai perintah agama dan tidak akan ada yang mau membelinya.

"Kalau hewan kurban yang dijual itu sakit atau cacat, pasti nggak akan laku, nggak ada orang mau beli," pungkasnya. **(rie)**


BERITA KEHILANGAN

Teilah Hilang Sebuah STNK Kendaraan Roda 2 dengan

Nopol : DIR 4331 BQ
 Merk : HONDA
 Tahun : 2010
 Warna : HITAM
 Noka : MHTJ8912IAK148189
 Nosin : H01292978
 Atas Nama : HR SRI BINTORO HADIVIDJODO, SSI
 Alamat : JL. SERAYU RAYA 4 BTN KEKALIK BARU RT 009/057 KEL. PAGESANGAN BARAT KEC. MATARAM KOTA MATARAM
 KET. : HILANG DI RUMAH PELAPOR

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	DKP3 Pastikan Hewan Kurban Layak	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	5	
Author	Eko/Gatot	

DKP3 Pastikan Hewan Kurban Layak

SATELITNEWS, CIPUTAT—Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan keamanan dan kesehatan hewan kurban yang masuk ke wilayah Tangerang Selatan menjelang hari raya Iduladha. Hal tersebut disampaikan Asisten Daerah II, Heru Agus Santoso saat melakukan pengecekan hewan kurban bersama DKP3 Tangsel, pada Selasa (11/6).

“Menjelang Iduladha ya, kita pastikan hewan-hewan yang masuk ke Tangsel harus sehat karena nantinya akan diperjualbelikan dan dikonsumsi,” ucapnya.

Hal ini penting untuk memastikan keseluruhan hewan kurban terbebas dari penyakit yang sering menjangkit seperti penyakit mulut dan kuku atau lumpy skin disease. Hal senada disampaikan Kepala Puskeswan DKP3 Tangsel, Pipit Surya Yuniar. Dia menyatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah penyakit pada hewan kurban sejak tahun-tahun sebelumnya.

“Kami sudah melakukan vaksinasi terhadap hewan kurban yang mendapatkan suplai vaksin dari pusat. Pelaksanaan vaksinasi ini diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota dan kami terus mengontrol agar tidak ada kasus PMK dan LSD di Tangsel,” ujarnya.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan kurban serta menjaga produk hewan tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat.


Untuk mengatur lalu lintas hewan dan produk hewan kurban, DKP3 Tangsel selalu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan, dan Media Penyebar Penyakit Hewan. Setiap hewan atau produk hewan yang akan masuk ke Tangsel harus melalui prosedur yang ketat. Dimana, pemohon wajib mengajukan permohonan pemasukan melalui aplikasi yang telah terintegrasi, yaitu lalulintas.isikhnas.com.

“Permohonan ini bisa diajukan di tingkat provinsi untuk antar provinsi, atau di tingkat kabupaten/kota untuk dalam satu provinsi,” tambahnya.

Dalam mekanismenya, setelah permohonan disetujui, daerah asal hewan kurban seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah akan mengeluarkan rekomendasi pengeluaran dan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. DKP3 Tangsel mensyaratkan agar hewan yang akan masuk telah diuji bebas PMK atau telah divaksin PMK sesuai ketentuan.

DKP3 Tangsel juga memastikan bahwa semua persyaratan pemasukan dan sertifikat pengeluaran dari daerah asal hewan kurban sudah terintegrasi dengan baik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar hewan kurban yang masuk ke wilayah Tangerang Selatan tetap aman dan sehat, sehingga masyarakat dapat merayakan Iduladha dengan tenang. **(eko/gatot)**



Title	Dukung Petani Lebih Maju	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Gala	
Page	3	
Author	Edi Kusnaedi	



BUPATI Bandung, Dadang Supriatna menyerahkan bantuan saat berlangsung rembug paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bandung, di Rumah Makan Panyaungan, Jalan Raya Banjaran-Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (11/6). EDI KUSNAEDI/KORAN GALA

Dukung Petani Lebih Maju

Pemkab Bandung Gulirkan Berbagai Bantuan

SOREANG, (KG),-

Total sudah Rp25 miliar anggaran hibah yang digelontorkan oleh Pemkab Bandung untuk para petani di wilayahnya pada 2023 lalu. Rencananya, anggaran tersebut akan ditambah sebesar Rp19 miliar pada 2025 mendatang.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan, selain anggaran hibah, Pemkab Bandung juga menggulirkan berbagai program untuk para petani seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

"Sebanyak 87.000 petani di Kabupaten Bandung mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka adalah para petani padi, hortikultura dan palawija," kata Dadang saat menghadiri Rembug Paripurna Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bandung di salah satu rumah makan di Jalan Raya Ban-

jaran-Soreang, Selasa (11/6).

Dadang pun akan memberikan hibah kepada KTNA Kabupaten Bandung sebesar Rp200 juta, di antaranya untuk pemberian hibah para pengurus KTNA kecamatan pada 2025. Selain itu, pemerintah terus mendorong ketersediaan sumber daya alam, seperti ketersediaan prasarana dan sarana air serta infrastruktur pembangunan pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut mengapresiasi pelaksanaan Rembug Paripurna yang digagas oleh KTNA Kabupaten Bandung

ini. "Kegiatan ini sebagai forum diskusi. Sehingga kami mendorong para pengurus KTNA untuk merumuskan dan melihat isu serta perkembangan berkaitan dengan pertanian ke depan," ujarnya.

Dadang sangat menghargai apa yang menjadi kiprah dan kerja keras para petani di Kabupaten Bandung. Sebab, bidang pertanian sebagai indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga melihat para petani hebat, sehingga ia optimis bidang pertanian di Kabupaten Bandung bisa dipertahankan, bahkan meningkat dari produktivitasnya.

"Untuk itu, kami dari pemerintah memberikan dukungan kelembagaan kepada para petani. Saya juga mendorong pengurus KTNA untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan paham informasi dan teknologi," tuturnya.

Harapan lainnya, kata Dadang, paham big data, riset and development, institusi yang kuat dan pengelolaan keuangan dengan baik. Menurutnya, kelima hal tersebut dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045.

Persiapkan lahan

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu, juga turut memberikan perhatian khusus kepada para petani padi yang mengalami gagal panen, dengan mendapatkan ganti rugi Rp6 juta per hektar melalui program asuransi. Sedangkan untuk peternak sapi sebesar Rp10 juta per ekor, jika mengalami kerugian dari usaha peternakannya.

Tak hanya itu, Bupati Bandung juga sedang berusaha untuk mewacanakan persiapan lahan seluas 5000 hektar untuk demplot pertanian. Rencana itu untuk menindaklanjuti kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Ban-

dung, beberapa waktu lalu.

"Ribuan hektar lahan demplot yang disiapkan itu, nantinya didukung dengan persiapan alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan ketahanan pangan. Untuk itu, saya berharap Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan agar menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan para petani," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Bandung, Nono Sambas berharap bahwa KTNA bisa terus kerja sama dengan Pemkab Bandung.

"Kami tidak akan melepaskan pertanian. Karena kehidupan kami dari pertanian. Tentu kami mendorong program bupati ini untuk dilanjutkan, khususnya pada bidang pertanian. Lewat kegiatan ini, jadi upaya meningkatkan pembangunan pertanian menuju kesejahteraan petani," ujar Nono. **(Edi Kusnaedi)****

Title	KPU RI Belum Kembalikan Sisa Anggaran	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Tribun Medan	
Page	2	
Author	Tribun Network/Reymas Abdila	

KPU RI Belum Kembalikan Sisa Anggaran

► Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas PNS Capai Rp 39,26 Miliar



TRIBUN MEDIANHO

LAPORAN BPK - PNS saat mengikuti sebuah acara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan adanya penyimpangan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebesar Rp 39,26 miliar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023.

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan adanya penyimpangan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebesar Rp 39,26 miliar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023.

Nilai itu berdasarkan audit akumulasi terhadap 46 kementerian/lembaga (K/L). "Penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 39.260.497.476 pada 46 K/L," bunyi laporan BPK di-

kutp, Selasa (11/6).

Penyimpangan belanja perjalanan dinas tersebut paling banyak terjadi akibat perjalanan yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran dilakukan oleh 38 K/L dengan nilai Rp 19,65 miliar.

Penyelenggara Pemilu Komisi Pemulihan Umum (KPU) tercatat belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas Rp 10,57 miliar ke kas negara.

Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) senilai Rp 1,5 miliar dianggap tidak akuntabel dan tidak diyakini kewajarannya serta Kemenkum HAM senilai Rp 1,3 miliar.

Permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya dilakukan oleh 23 K/L dengan nilai Rp 4,84 miliar.

Penyimpangan disebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 1,15 miliar karena tanpa didukung bukti pengeluaran secara akuntabel.

Lalu Kementerian PANRB senilai Rp 792 juta, serta Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp 571,74 juta.

Selain itu, sebanyak 14 K/L dengan nilai Rp 14,76 miliar tercatat belum memberikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Nominal perjalanan dinas tanpa bukti pertanggungjawaban yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) senilai Rp 5 miliar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) senilai Rp 211,81 juta, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) senilai Rp 7,4 miliar.

BPK pun menemukan adanya perjalanan dinas fiktif senilai Rp 9,3 juta yang dilakukan oleh BRIN dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 2.482.000 merupakan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. BRIN sebesar Rp 6.826.814 merupakan pembayaran atas akomodasi yang fiktif," tulis BPK dalam laporannya.


Atas permasalahan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 39,26 miliar di atas, ditindaklanjuti melalui pertanggungjawaban dan/atau penyetoran ke kas negara sebesar Rp 12,79 miliar.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberta meminta agar KPU RI sebagai mitra agar memberikan penjelasan atas dugaan penyimpangan perjalanan dinas.

Menurutnya poin pertanyaan terkait Rp 10,57 miliar perjalanan dinas harus segera dijelaskan kepada publik apakah sudah dikembalikan ke kas negara.

"Kita sebagai mitra dari penyelenggara Pemilu terkhusus untuk KPU, kembali saya mengingatkan penyimpangan belanja perjalanan dinas yang belum dijawab," kata Rezka.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan perihal anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 10 miliar lebih itu telah dilaporkan dan dikembalikan ke kas negara. (tribun network/reymas abdila)

Title	Lintas Lembaga Atensi Kasus Rabies	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Nusa Bali	
Page	3	
Author	Nusa Bali	



Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali berlangsung di Gedung BPBD Provinsi Bali, Jalan DI Panjaitan, Niti Mandala, Denpasar, Senin (10/6). ● IST

Lintas Lembaga Atensi Kasus Rabies

★ Jadi Ancaman Sektor Pariwisata Bali

Penggunaan vaksin yang berkualitas lebih baik daripada vaksin murah tapi tidak efektif

DENPASAR, NusaBali

Meski sudah terjadi penurunan rabies dibandingkan tahun 2023 lalu, Provinsi Bali masih terus berupaya untuk menahan adanya kasus baru di tahun 2024. Hal itu terungkap dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Tim Koordinasi Daerah (TKD) Pencegahan

dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali dipimpin Sekretaris Tim, I Made Rentin di Gedung BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Bali, Jalan DI Panjaitan, Niti Mandala, Denpasar, Senin (10/6).

Rakor kali ini juga diikuti oleh perwakilan Bappeda Bali, Balai Besar Veteriner Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Dinas Kominfos Provinsi Bali.

Rentin yang juga Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali mengatakan, perlunya langkah konkrit, terpadu dan reguler untuk menyamakan persepsi serta tidak membiarkan kasus

rabies di Bali berjalan fluktuatif. "Setelah mengevaluasi apa yang dilakukan masing-masing kelompok kerja di provinsi, kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota bahkan melibatkan langsung perangkat desa," ujar Rentin.

Upaya Pemprov Bali itu didukung Perwakilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian RI, Pebi Purwo Suseno. Dia menyatakan dukungan dengan Tim Daerah Provinsi Bali. Purwo Suseno memberikan komitmen Kementerian untuk ikut mengawal upaya pengendalian rabies di Bali.


Purwo Suseno juga berharap adanya analisis mendalam

terhadap kasus rabies di Bali agar diketahui penyebab pastinya. "Misalnya apakah desa tersebut sudah lama tidak mendapat program vaksinasi," tegas Purwo Suseno.

Sedangkan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) Animal Health Adviser, John Weaver, dalam kesempatan tersebut mengatakan pentingnya data real time dan valid dalam upaya pengendalian rabies di Bali. Hal ini menurutnya akan membantu pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi untuk perubahan perilaku masyarakat yang sadar ancaman rabies. Selain itu, dia juga mengingatkan tentang mutu vaksin rabi-

es. "Penggunaan vaksin yang berkualitas lebih baik daripada vaksin murah tapi tidak efektif dan justru mengeluarkan biaya lebih," katanya.

Sebaliknya, Akademisi Universitas Udayana Prof Dr Ni Nyoman Sri Budayanti, SpMK juga menyampaikan komitmen akademisi untuk mendukung pemerintah dalam penyelesaian persoalan rabies di Bali. "Paling tidak sebulan sekali kita bertemu membahas ini, karena banyak penyakit lain juga mengintai, seperti flu burung," ujarnya. Sri Budayanti juga mengatakan pentingnya kewaspadaan terhadap rabies agar tidak berdampak ke sektor pariwisata. 📧 a

Title	Bupati Kotabaru Hadiri Panen Padi Sawah di Desa Berangas Pulau Laut Timur	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	6	
Author	Sah	

Bupati Kotabaru Hadiri Panen Padi Sawah di Desa Berangas Pulau Laut Timur

KOTABARU, BPOST - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kotabaru mengadakan panen padi sawah di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Selasa (11/6). Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus SH.

Panen juga dihadiri pejabat teras Pemkab Kotabaru di antaranya Asisten Forkopimda, Ketua PKK Hajjah Fatma Idiana, Kepala SKPD secara camat.

Hadir pula dalam kegiatan itu Kelompok Tani Berkat Usaha Mandiri serta Kepala Desa di Kecamatan Pulau Laut Timur yang berkumpul mendukung penuh gerakan serta berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi bukti nyata dari

kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dan bangga kepada petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Berkat Usaha Mandiri.

Bahkan, semua unsur yang terlibat di dalamnya karena kerja keras, dedikasi dan kerja samanya sehingga panen padi sawah dapat terlaksana dengan lancar.

Ia berharap, panen padi ini dapat memotivasi seluruh petani, masyarakat dan jajaran pertanian untuk lebih terpacu dalam melakukan aktivitas meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani khususnya padi.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera di bidang agribisnis.

"Harapan saya panen raya Kelompok Tani Berkat Usaha Mandiri bisa mencapai 6.5 ton per hektare sekali panen," katanya.

Seperti tempat-tempat lain, Desa Pembelacanan bisa panen 11 ton per hektare. Untuk itu, kata Bupati, ini merupakan tugas bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendorong kelompok tani.

Bercocok tanam lebih banyak lagi ke depannya. Selain itu, perlu diperbaiki irigasi karena didukung sumber air Seratak yang punya potensi kendati di

musim kemarau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kotabaru, Saperiani mengatakan, satu di antara upaya yang dilakukan adalah peningkatan mutu intensifikasi (PMI) 2024.

Bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, selain penggunaan sarana produksi yang tepat guna.

Diharapkan program itu juga menjadi percontohan bagi kagiatan pertanian padi di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di 2024 ini melaksanakan kegiatan peningkatan mutu intensifikasi agribisnis padi sa-

wah seluas 100 hektare di lima lokasi, di antaranya Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah, Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelumpang Utara dan Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara.

Upaya lainnya, Pemerintah Daerah meningkatkan hasil produksi padi yaitu dengan mengusulkan kuota pupuk bersubsidi ke Pemerintah Pusat agar bisa ditambah. Sebelumnya, pupuk urea 966.882 ton menjadi 1.623.098 ton, pupuk NPK sebelumnya 932.161 ton menjadi 1.992.788 ton dan pupuk organik sebelumnya tidak ada menjadi 1.228.659 ton. (sah/*)



DISKOMINFO KOTABARU

ALAT PANEN - Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus SH menaiki alat pemanen padi saat kegiatan panen raya padi sawah di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur.




DISKOMINFO KOTABARU

TIBA DI LOKASI - Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus SH, Ketua TP PKK Hajjah Fatma Idiana saat tiba di lokasi panen raya padi sawah di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur Kotabaru.



DISKOMINFO KOTABARU

PANEN RAYA - Kegiatan panen raya padi sawah di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pulau Laut Timur Kotabaru.

Title	Farida Pasok Semangka dari Pelaihari	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	7	
Author	Han	



BANJARMASIN POST/HANANI

PANEN SEMANGKA
- Sejumlah petani semangka di wilayah tiga kecamatan Daha, melakukan panen sata musim kemarau, beberapa waktu lalu.

Faridah Pasok Semangka dari Pelaihari

KANDANGAN, BPOST - Bagi penggemar semangka, kini harus rela membeli buah ini dengan harga mahal. Sejak Ramadan, harga semangka Rp 8.000 menjadi 10.000 per kilogram.

Saat ini kembali mengalami kenaikan, menjadi Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kilogram. Selasa (11/6), para pedagang rata-rata membanderol harga tersebut.

Pedagang beralasan, buah semangka yang dijual dipasok dari luar daerah, yaitu Tanahlaut. "Kami membelinya sudah mahal di Pelaihari ditambah lagi biaya angkut," kata pedagang semangka di Jalan Letjend Soeprapto, Faridah, Selasa (11/6).

Pedagang menjual buah itu per potong berdasarkan berat saat ditimbang. "Kalau membeli satu biji, boleh kurang sedikit," katanya.

Meskipun kini mahal, menurutnya, minat masyarakat membeli semangka masih tinggi. Apalagi, saat cuaca panas.


HSS adalah satu di antara daerah penghasil semangka. Namun, petani di wilayah tiga kecamatan Daha atau Nagara yaitu Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat hanya bisa menanam pada saat musim kering atau kemarau.

Petani di HSS menanam semangka di lahan rawa yang lahannya kering pada periode musim tersebut.

Pada musim panen, memasok buah semangka ke luar daerah seperti Kalteng, dan Kaltim, selain di wilayah HSS dan Kalsel sendiri.

Musim tanam semangka biasan antara Juli-Agustus dan panen pada Oktober. Bahri, salah satu petani di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan mengatakan, saat ini sudah menyiapkan bibit, sambil menunggu lahan rawanya kering.

Sementara, sebagian petani di Desa Samuda, Kecamatan Daha Utara sudah melakukan tanam dan tinggal menunggu hasil panen. "Panen diperkirakan akhir Juni ini," ucap Yusuf, petani semangka dari Desa Samuda. (han)

Title	Gerakan Pangan Murah untuk Kendalikan Inflasi	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Lampung Post	
Page	5	
Author	Eliyah	

Gerakan Pangan Murah untuk Kendalikan Inflasi

Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

ELIYAH

elijah@lampungpost.co.id

SPERTI sudah menjadi kebiasaan, menjelang perayaan hari besar keagamaan, harga kebutuhan pokok naik. Akibatnya, daya beli masyarakat turun. Hal itu tentu saja memicu inflasi. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar angka inflasi tetap moderat dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Seperti yang dilakukan Pemkab Lampung Barat. Menjelang Hari Raya Iduladha 1445 H, Pemkab Lambar melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dipusatkan di Taman Kota Liwa, Selasa (11/6).

Kegiatan itu dalam rangka mengantisipasi lonjakan inflasi di wilayah Lampung Barat. Penjabat (Pj) Bupati Lambar, Nukman, mengharapkan kegiatan GPM Pemkab yang bekerja sama dengan Bulog dapat membantu masyarakat. Sebab, GPM menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Adapun sembako yang disediakan dalam kegiatan pasar murah itu adalah beras sebanyak 8 ton, gula pasir 200 kg, minyak goreng 600 liter, dan tepung terigu 170 kg. "Melalui kegiatan GPM ini, kami mengharapkan masyarakat akan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," kata Nukman.

Sebab, kata dia, GPM menyediakan beberapa bahan pokok dengan harga di bawah harga normal. Seperti beras Rp11.400/kg, gula pasir Rp16 ribu/kg, minyak goreng Rp16 ribu/liter, dan tepung terigu Rp12 ribu/kg.

Dari APBN

Untuk dana kegiatan GPM ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Tujuannya sebagai upaya nyata Pemkab Lambar mengantisipasi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang sering terjadi setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan.

"Pemkab tentunya berharap pengendalian harga ini mampu mengatasi dampak dari kenaikan harga sejumlah komoditas," ujarnya.

Kegiatan GPM tersebut menindaklanjuti arahan Mendagri dalam rapat koordinasi inflasi mingguan. Pj Bupati juga mengharapkan GPM ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung Barat.

"Melalui kegiatan GPM ini maka masyarakat juga akan memperoleh bahan pangan yang murah, namun tetap berkualitas, terutama menghadapi Hari Raya Iduladha ini," ujar dia. (B1)




"Melalui kegiatan GPM ini, kami mengharapkan masyarakat akan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau."

Nukman

Pj Bupati Lampung Barat

■ DOK LAMPPOST.CO

Title	Hadapi Kemarau, Percepat Menanam	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	10	
Author	Shd/zuk	

Hadapi Kemarau, Percepat Menanam

INTENSITAS hujan di Kabupaten Luwu mulai menipis. Juni ini berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sudah memasuki musim kemarau.

Observer Stasiun Meteorologi BMKG Andi Djemma Masamba, Hario Bimo Bismantoko mengatakan sesuai perkiraan sebenarnya saat ini sudah masuk musim kemarau.

"Untuk musim kemarau, harus sudah masuk di bulan Juni ini. Namun masih disertai hujan ringan dan sedang," kata Hario kepada FAJAR, kemarin.


Hujan sedang dan ringan masih terjadi di Luwu dan sekitarnya. Diprediksi intensitas hujan makin menurun. Bahkan puncak kemarau September mendatang. Hujan makin berkurang hingga terjadi kemarau.

Berkurangnya intensitas curah hujan hingga puncak kemarau September mendatang harus menjadi perhatian. Apalagi terhadap sektor pertanian. Petani di Luwu harus pasang kuda-kuda. Ketersediaan air pun perlu diantisipasi agar aktivitas petani dalam bercocok tanam tidak terhambat.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Luwu, Islamuddin mengaku telah mempersiapkan para petani menghadapi musim kemarau. "Sebagian petani di Luwu sudah turun sawah dan kita pikirkan sawah tidak mengalami kekeringan," katanya.

Dia akan berupaya mengadakan pompa air. Tinggal mencari mata air. Bukan hanya itu, dia meminta para petani melakukan percepatan musim tanamnya. Itu sebelum musim kemarau tiba.

Solusinya musim tanam dipercepat. Percepatan ini agar petani dapat memanfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. **(shd/zuk)**

Title	Pantau Stok dan Harga Pangan Jelang Iduladh	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Lampung Pos	
Page	5	
Author	CKI/BI	



■ DOK DINAS KETAHANAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PESAWARAN
PANTAU STOK DAN HARGA. Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran memantau stok dan harga pangan di Pasar Umbul Kluwih, Kecamatan Way Ratai, Selasa (11/6).

Pantau Stok dan Harga Pangan Jelang Iduladh

DINAS Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran memonitor ketersediaan dan harga bahan pangan di Pasar Umbul Kluwih, Kecamatan Way Ratai.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran, Hendra Sulistyanto, mengatakan kegiatan ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan menjelang Iduladh.

“Pemantauan ini guna memastikan ketersediaan dan harga bahan pangan stabil. Kami melakukannya dengan metode survei dan wawancara langsung

kepada para pedagang di Pasar Umbul Kluwih,” ujarnya, Selasa (11/6).

Dia mengatakan setelah melakukan survei, hanya komoditas cabai merah yang naik. Untuk harga bahan pangan lainnya relatif stabil.


“Cabai merah mengalami kenaikan harga Rp20 ribu. Yang sebelumnya Rp40 ribu/kg, per hari ini harga cabai menjadi Rp60 ribu/kg,” ujar dia.

Menurutnya, kenaikan cabai itu kemungkinan karena faktor cuaca dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi menjelang Hari Raya Iduladh.

“Namun, untuk harga bawang merah turun Rp10 ribu, yang sebelumnya Rp50 ribu/kg menjadi Rp40 ribu/kg,” kata dia.

Dia mengatakan stok bahan pangan pokok di Kabupaten Pesawaran dalam kondisi aman, serta tidak ada produk makanan dan minuman yang kedaluwarsa.

“Kami berharap dengan adanya hasil pemantauan ketersediaan dan harga bahan pangan pokok ini, dapat menjadi acuan para *stakeholders* dalam mengambil kebijakan terkait,” katanya. (CKI/BI)

Title	Pemerintah Kota Tangerang Pastikan Harga Komoditas Masih Normal	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Tangsel Pos	
Page	5	
Author	Mde/cmb	

Jelang Idul Adha

Pemerintah Kota Tangerang Pastikan Harga Komoditas Masih Normal



DAGING AYAM. Salah satu penjual daging ayam di pasar tradisional Kota Tangerang tengah menjajakan jualannya di lapak. Kini jelang Idul Adha, harga komoditas daging ayam masih normal.

TANGERANG-Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melakukan monitoring harga kebutuhan pangan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Tangerang. Terkini, pemerintah memastikan harga kebutuhan pokok masih terpantau stabil.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang, Sali Rosadi menuturkan, Pemkot Tangerang telah melaksanakan monitoring perkembangan harga kebutuhan pangan pokok secara rutin. Hasilnya, perkembangan harga dinilai masih dalam kategori stabil seperti beras premium (Rp 14 ribu per kg), gula pasir (Rp 18-19 ribu per kg), minyak goreng kemasan (Rp 15-16 ribu per liter), daging ayam broiler (Rp 40-45 ribu per kg), daging sapi (Rp 140 ribu per kg) serta sedikit kenaikan pada cabai merah keriting (Rp 50-70 ribu per kg).


"Kami telah memantau intensif serta terus berkoordinasi

dengan para pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang tetap terkendali," ujar Suli, Selasa (11/6).

Ta melanjutkan, Pemkot Tangerang juga akan terus inspeksi di sejumlah lokasi pasar tradisional di Kota Tangerang. Seperti Pasar Anyar, Pasar Malabar, Pasar Laris, Pasar Ramadhan, Pasar Poris, Pasar Babakan, Pasar Bateko, Pasar Sipon sampai Pasar Plaza Ciledug Baru.

Berikutnya, Pemkot Tangerang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga pangan pokok dengan tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga barang tersebut.

"Kita berharap dengan adanya stabilitas harga ini, masyarakat dapat merayakan Idul Adha pekan depan nanti dengan tenang tanpa khawatir adanya lonjakan harga pangan yang drastis," tambahnya. (mde/cmb)

Title	Pemkot Cilegon Tekan Inflasi Melalui Pasar Murah	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Tangsel Pos	
Page	6	
Author	Rie/net	

Pemkot Cilegon Tekan Inflasi Melalui Pasar Murah

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cilegon menggelar gerakan pangan murah di halaman Kantor Kecamatan Ciwandan, sebagai salah satu langkah untuk menekan inflasi menjelang hari raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Gerakan pangan murah digelar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon dengan menyediakan sejumlah barang kebutuhan pokok dengan harga subsidi, diantaranya beras, minyak goreng, telur, daging ayam, gula dan kebutuhan pokok lainnya.

Walikota Cilegon, Helldy Agustian, yang hadir bersama General Manager (GM) PT. Indorama Petrochemical Malim Hander Joni, Kepala DKPP Kota Cilegon M Ridwan dan sejumlah pejabat Pemkot Cilegon mengatakan, gerakan pangan murah dilakukan sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat, khususnya menjelang lebaran.

"Semoga dengan adanya gerakan pangan murah ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Harganya tentu saja kita jual di bawah harga pasaran, jadi akan lebih terjangkau oleh masyarakat," kata Helldy, seperti dikutip dari Antara Banten, Senin (11/6).

Menurut Helldy, menekan laju inflasi harus dilakukan karena menjelang hari raya harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan.

"Kita harus mampu menekan inflasi, terutama saat mendekati Lebaran. Dimana, harga kebutuhan pokok biasanya naik," ungkapnya.

Atas dasar itu, Helldy menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah akan digelar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Cilegon.

"Gerakan pangan murah ini akan kita selenggarakan di delapan kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Jadi, semua kecamatan akan kebagian. Jadi untuk masyarakat di tunggu saja," tegasnya.

Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi mengapresiasi atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah tersebut, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Gerakan pangan murah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama karena wilayah Ciwandan jauh dari pasar induk, sehingga ini sangat membantu," katanya.

Warga Ciwandan, Sukrona mengaku senang dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah, karena harga - harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran.

"Ini sangat membantu, terutama saat harga kebutuhan pokok naik. Semoga gerakan pangan murah ini bisa terus ada, jadi kami sebagai masyarakat bisa sangat terbantu," katanya. (rie/net)

Title	Petani Segera Manfaatkan Irigasi Gantung Mesuji-Tulangbawang
Date	12 Juni 2024
Media	Lampung Pos
Page	6
Author	Det/Rio



Kementerian Pertanian

Petani Segera Manfaatkan Irigasi Gantung Mesuji-Tulangbawang



BALAI Besar Mesuji Sekampung segera menyelesaikan perbaikan saluran irigasi gantung yang berada di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Tulang Bawang Lampung.

Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Roy Panagom Pardede, mengatakan saluran irigasi gantung ini dibangun balai mulai dari Desember 2020 hingga saat ini dalam masa pemeliharaan.

Ia menyampaikan panjang saluran ini sekitar 94 km dengan total anggaran kurang lebih Rp97 miliar. Namun, dalam proses pengerjaan hingga selesai dibangun terdapat beberapa kendala, seperti kondisi lokasi dan lainnya.

"Kami temui banyak permasalahan, awal pada masa Covid-19 dan karena lokasi berada di lahan persawahan jadi menyesuaikan dengan kondisi tanam yang ada. Itu yang menyebabkan pengerjaan pembangunan irigasi agak lama, tapi akhirnya bisa selesai dan adanya kebocoran kami upayakan untuk perbaikan," kata Roy, Selasa (11/6).

Menurut dia, saluran irigasi tersebut dapat mengatasi persoalan air bagi pe-



■ DETA CITRAWAN

Balai Besar Mesuji Sekampung segera menyelesaikan perbaikan saluran irigasi gantung yang berada di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Tulang Bawang Lampung. Saluran irigasi gantung ini dibangun balai mulai dari Desember 2020 hingga saat ini dalam masa pemeliharaan.

tani ketika musim kemarau untuk 3.100 hektare lahan di tiga desa, yaitu Desa Wonoagung (Tuba), Desa Bandaranom (Mesuji), dan Desa Bumiratu (Tuba).


"Tujuan dari adanya irigasi ini kami ingin memudahkan petani yang sebelumnya menggunakan saluran tersier itu dengan memompa dua sampai tiga kali sampai masuk ke lahan dan memakan biaya yang cukup banyak. Kami upayakan seminggu ke depan saluran irigasi gantung ini bisa dimanfaatkan optimal masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR, Ismail Widadi, yang hadir melihat langsung kondisi saluran irigasi gantung tersebut menyampaikan memang terjadi

kebocoran di beberapa titik ini diakibatkan kondisi lokasi.

"Ada kebocoran pada saluran ini meski berfungsi, saluran gantung sepanjang 94 km tentu pasti ada kebocoran, tapi persentasenya tidak besar dan perbaikan sudah dilakukan BBWS sekitar 50 persen. Semoga cepat selesai sesuai dengan harapan warga agar bisa bermanfaat," kata Ismail.

Seperti dikatakan Kepala Kampung Bumiratu, Abdul Malik, pihaknya mewakili masyarakat meminta agar dapat segera merasakan manfaat saluran irigasi gantung itu. Tidak hanya itu warga pun akan turut membantu jalannya pemeliharaan saluran irigasi tersebut. (DET/RIO)

Title	Puluhan Ribu Hektare Sawah Terancam Gagal Tanam	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	11	
Author	Adib/Mardiana	

Puluhan Ribu Hektare Sawah Terancam Gagal Tanam

Hanya Andalkan Air Hujan

SATELITNEWS, PANDEGLANG - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, mencatat ada 22 ribu hektare lebih sawah di Pandeglang terancam gagal tanam. Hal itu karena, kondisi sawah yang hanya mengandalkan air hujan atau sawah tadah hujan.

Kepala DPKP Kabupaten Pandeglang M. Nasir mengatakan, memasuki musim kemarau ini masih ada puluhan ribu hektare sawah terancam gagal tanam, karena hanya mengandalkan air hujan. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya mengatasi persoalan tersebut, agar semua lahan pertanian bisa dioptimalkan lahan mereka meski pasokan air sedikit.

"Hampir lebih dari 22 ribu hektare, yang merupakan lahan

sawah tadah hujan. Mulai dari pertengahan sampai ke Selatan Kabupaten Pandeglang, kalau tidak segera kita carikan solusi, bisa gagal tanam. Tapi kita akan berupaya, agar tidak terjadi hal itu," kata Nasir, Selasa (11/6/2024).

Nasir mengatakan, salah satu upaya mengatasi persoalan gagal tanam akibat tidak ada pasokan air, yakni dengan mencari sumber air dan dialirkan ke areal pertanian. Oleh karenanya, pihaknya sudah menyediakan bantuan berupa pompa air untuk membantu mengalirkan air ke areal pertanian.

"Makanya, kita mencari sumber-sumber air permukaan, seperti sungai, saluran, bendungan, dan mata air, itu semata-mata adalah menjadi sumber air yang nanti ditarik dengan menggunakan pompanisasi dan irigasi perpompaan," tambahnya.

Nasir mengatakan, berdasar-



MENGAMBIL AIR : Sejumlah petani di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, mengambil air untuk dialirkan ke areal pertanian, Selasa (11/6).

kan informasi yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Pandeglang sudah mulai memasuki musim kemarau. Untuk mencegah kekurangan pasokan air, pihaknya sudah membuat

beberapa skema agar pasokan air ke areal pertanian tetap mengalir.

"Informasi dari BMKG, kita sudah memasuki musim kering. Kita khawatir, tanaman yang memang sedang ditanam mengalami keker-

ingan. Kita bersama para Babin, petugas Provinsi, dan Pusat, mengerahkan berbagai bantuan mobilisasi pompanisasi," ujarnya.

Nasir juga menargetkan, skema mengatasi musim kemarau itu bisa berjalan secara keseluruhan di bulan Agustus mendatang. Dengan begitu, para petani bisa tetap menggarap dan mengolah lahan pertanian meski musim kemarau.

"Kemudian, irigasi perpompaan yang sebentar lagi akan kita buat dan kita siapkan, sehingga pada bulan Agustus mendatang semua sarana dan prasarana itu bisa berjalan. Apabila kita kekurangan air, semua pompa itu sudah terpasang dan bisa menarik air untuk mencukupi kawasan lahan tadah hujan," pungkasnya.

"Selain itu, para petani bisa meminjam pompa air di brigade kita yang ada di Kodim ada 100 buah pompa yang kita

alokasikan yang ditempatkan di masing-masing Koramil untuk kelompok-kelompok yang ada di wilayah Koramil tersebut," sambungnya.

Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pandeglang Anton Haerul Samsi, berharap agar dinas terkait bisa membantu mengantisipasi gagal tanam akibat musim kemarau. Tindakan itu harus dilakukan, mengingat mayoritas warga Pandeglang merupakan petani dan banyak areal pertanian yang mengandalkan air hujan.

"Kita ingin agar ada antisipasi, menghadapi musim kemarau. Karena, selama ini penanganan atau pencegahan gagal tanam akibat kemarau, belum merata dan masih banyak petani yang mengeluh. Makanya, kita harapkan agar tahun ini pencegahannya merata di semua wilayah," harapnya. (adib/mardiana)

Title	Revitalisasi Kebun Kopi
Date	12 Juni 2024
Media	Banjarmasin Post
Page	2
Author	Tribunnews/Jeprima




Kementerian Pertanian



TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Revitalisasi Kebun Kopi

Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn (kiri) berbincang dengan Ketua Yayasan Kopi Nasional Litha Brent (kanan) dan petani kopi sesuai kick-off revitalisasi Kebun Kopi Cikoneng di Bogor, Jawa Barat, Senin (10/6).

Title	Warga Tetap Serbu Beras Murah	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	10	
Author	An/zuk	



ASHARI/FAJAR

OPERASI PASAR. Warga Bone antri membeli bahan pokok pada gerakan pangan murah (GPM) jelang Iduladha di Jl Ahmad Yani, Bone, Selasa, 11 Juni.

Warga Tetap Serbu Beras Murah

BONE, FAJAR — Warga Bone menyerbu gerakan pangan murah (GPM) jelang Iduladha di Jl Ahmad Yani, Selasa, 11 Juni.

GPM yang digelar serentak di Sulsel ini terpan-tau dipadati pembeli sejak acara belum dibuka. Lima ton beras disediakan oleh Pemkab bekerja sama Badan Urusan Logistik (Bulog) Bone.

Beras dijual dengan

harga Rp58 ribu alias lebih murah Rp2 ribu dari harga pasaran. Selain beras, juga disediakan bahan pokok lain, seperti ayam, telur, sayur mayur, dan ikan.

"Dari pagi menunggu, harga yang ditawarkan itu nda beda jauh dengan harga pasar, cuma murah seribu hingga Rp5 ribu," terang Raliah, salah seorang warga yang datang sejak

pagi, Selasa, 11 Juni.

Sementara harga bahan pokok di sejumlah pasarsaat ini dilaporkan telah naik. Di Pasar Bajoe, harga bawang merah Rp50 ribu per kg dan bawang putih Rp55 ribu. Naik di kisaran Rp10 ribu. Di pasar murah, bawang merah-putih hanya Rp30 ribu-35 ribu.

Bulog sendiri mengaku memiliki kesediaan beras hingga 150 ton untuk dua

hari event pasar murah ini. Namun, pihaknya menyediakan stok tiga ton awal, jika nantinya habis maka akan terus ditambahkan hingga seluruh masyarakat mendapatkan jatah.

"Jadi untuk hari ini sudah berjalan 5 ton, kita tambahkan kalau habis stoknya," ujarnya.


Pj Bupati Bone Andi Islamuddin mengatakan kegiatan ini menjadi kali ke-

12 digelar. Diharapkan bisa menjaga laju inflasi. GPM pada April lalu dilaporkan berhasil menurunkan inflasi dari 2,7 persen.

"Makanya gerakan seperti ini harus senantiasa kita tingkatkan. Insyaallah untuk pastikan stabilitas harga di pasar tim pengendali inflasi daerah akan kunjungi sejumlah pasar," terangnya. **(an/zuk)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Dekot Terus Perjuangkan Nasib Honorer	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Gorontalo Post	
Page	10	
Author	Tr-36	

Dekot Terus Perjuangkan Nasib Honorer

Berharap Pengangkatan TPKD Jadi PPPK Harus Dilakukan

GORONTALO-GP-Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo diminta segera menyelesaikan pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) alias honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Kami DPRD Kota Gorontalo meminta pada BKPP Kota Gorontalo untuk TPKD menjadi PPPK sesuai dengan regulasi yang



Erman Latjengke

ada, pinta Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Erman Latjengke Erman saat diwawancarai usai melakukan rapat evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang

dilaksanakan di Aula I, Senin (10/06/2024). Legislator partai Demokrat menambahkan, dalam menyelesaikan hal tersebut BKPP memiliki waktu sampai masa honorer berakhir pada November 2024 nanti. Selain itu, di 2024 ini, sesuai penyampaian Kepala BKPP, bahwa tahun ini ada tiga kali penerimaan PPPK. Insya Allah teman-teman PPPK akan terakomodir dan semua tetap melalui mekanisme aturan yang berlaku. Sesuai dengan regulasi itu kan akan diselesaikan semua tenaga honorer yang datanya sudah masuk di Kementan. Tetapi semua kan bergantung pada kemampuan keuangan sehingga seleksinya tetap ada, æ

Title	Efek Lebaran Usai, Penjualan Eceran Turun	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	2	
Author	Dendi Siswanto	

■ PENJUALAN ECERAN

Efek Lebaran Usai, Penjualan Eceran Turun

JAKARTA. Penjualan eceran kembali turun. Ini sejalan dengan berakhirnya faktor musiman Lebaran.

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2024 ada di level 233,9, turun 1% *month to month* (mtm). Walau secara tahunan, IPR tumbuh 4,7% *year on year* (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi sekaligus Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan, penjualan eceran yang menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, seiring normalisasi aktivitas masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri 2024.

Dari laporan BI, penjualan sejumlah kelompok mencatat kontraksi. Yakni, peralatan informasi dan komunikasi turun 10,4% mtm, sandang turun 7% mtm, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau turun 0,5% mtm.

Namun, kontraksi lebih dalam tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif, yaitu suku cadang dan aksesori serta bahan bakar kendaraan bermotor.

Meski demikian, penjualan eceran ke depan berpotensi

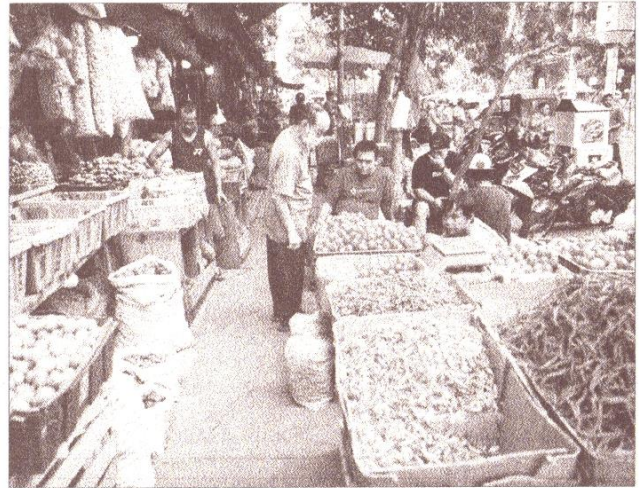
meningkat. Sebab, Indeks Ekspektasi Penjualan Eceran (IEP) pada Juli 2024 tercatat di posisi 137,2, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang ada di level 127,5. Menurut responden, peningkatan penjualan eceran pada periode tersebut didorong tahun ajaran baru sekolah dan program diskon tengah tahun.

Tak hanya itu, IEP pada Oktober 2024 juga diperkirakan

Penjualan eceran akan sangat dipengaruhi perkembangan permintaan.

kan meningkat menjadi 143,7 atau lebih tinggi dari periode sebelumnya di 140,4. Seiring penjualan yang diprakirakan meningkat dari sisi harga, tekanan inflasi pada Juli 2024 dan Oktober 2024 juga diproyeksikan meningkat.

Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan, penjualan eceran ke depan akan sangat dipengaruhi perkembangan permintaan yang




ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Meski demikian, penjualan eceran ke depan berpotensi meningkat.

berkaitan dengan daya beli masyarakat. Kondisi biaya hidup masyarakat cenderung meningkat, terutama dipengaruhi perubahan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh), harga beberapa komoditas pangan yang masih tinggi, biaya pendidikan, serta potongan Tapera yang memengaruhi keputusan konsumen menahan belanja, terutama barang tahan lama.

Menurut *Chief Economist* Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Inrastomo, sejumlah tantangan seperti gejolak ekonomi global dan pelemahan rupiah perlu terus diwaspadai. Sebab, ini berpotensi menaikkan harga barang dan bahan baku impor sehingga bisa menahan pertumbuhan penjualan ritel.

Dendi Siswanto

Title	Memetik Hikmah Ekonomi Idul Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	15	
Author	Jusuf Irianto	

Memetik Hikmah Ekonomi Idul Kurban

Tak sekadar spiritual, setiap peringatan hari besar agama memiliki hikmah ekonomi yang dapat dipetik. Pun dengan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Di dalam pelaksanaan Idul Kurban, mengandung sejumlah hikmah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat khususnya kaum dhuafa sesaat sejahtera dengan memperoleh jatah daging kurban yang dibagikan oleh panitia penyelenggara kepada yang berhak menerima. Walaupun bersifat sementara, warga tidak mampu dapat mengonsumsi daging yang relatif mahal harganya.

Idul Kurban juga meningkatkan kesejahteraan peternak kambing, domba, sapi, dan kerbau. Jumlah permintaan terhadap hewan ternak saat Idul Kurban melonjak tajam harus diiringi dengan pasokan yang cukup, agar harganya terjaga atau stabil.

Peringatan Idul Kurban yang diikuti penyembelihan hewan butuh ternak berjumlah besar. Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menunjukkan, kebutuhan hewan kurban secara nasional pada 2024 sebanyak 1,97 juta ekor.

Berdasarkan data Ditjen PKH, pemerintah dapat memastikan bahwa pasokan hewan kurban untuk peringatan Idul Adha 2024 dalam kondisi aman. Stok hewan kurban lebih dari cukup, mencapai 2,06 juta ekor berupa sapi, kerbau, kambing, dan domba, melagakan umat Islam.

Dengan kebutuhan hewan kurban yang sangat besar, Idul Adha memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan, Idul Kurban tahun ini bernilai ekonomi sangat tinggi, mencapai Rp 28,2 triliun.

Nilai ekonomi sebesar itu diperoleh IDEAS berdasarkan perhitungan potensi jumlah individu dan kelompok dalam masyarakat sebagai pekurban yang mencapai 2,16 juta rumah tangga. Jumlah pekurban 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan 2023.

Pada 2023, hanya ada 2,08 juta rumah tangga sebagai pekurban, memberi kontribusi nilai ekonomi sebesar Rp 24,5 triliun. Potensi kurban tahun ini diperkirakan meningkat lebih dari Rp 3,5 triliun alias bisa mencapai Rp 28 triliun lebih tinggi dari tahun lalu.

Selain menjaga *supply-demand* serta meningkatkan kesejahteraan, Idul Kurban mengandung hikmah lebih luas. Hikmah ekonomi Idul Kurban lain: peningkatan



Jusuf Irianto,
Guru Besar di Departemen
Administrasi Publik FISIP
Universitas Airlangga

ketahanan ekonomi dan pangan. Duo ketahanan ini bernilai sangat strategis bagi negara.

Memperkuat UMKM

Ketahanan ekonomi merupakan kemampuan negara menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun mampu memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh warga melalui pembangunan ekonomi seraya memelihara kemandirian ekonomi.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Patut disyukuri, di 2023, Indonesia mencapai pertumbuhan 5,05% di tengah situasi krisis dunia. Pertumbuhan diharapkan terus meningkat menuju kemandirian ekonomi bangsa.

Kemandirian ekonomi adalah salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pemerintah mendorong peningkatan jumlah wirausaha untuk meningkatkan gairah kegiatan ekonomi yang melibatkan baik usaha skala besar maupun mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peringatan Idul Kurban dengan kebutuhan ternak sangat besar merupakan instrumen bagi pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi. Kemampuan menyeimbangkan *supply-demand* hewan kurban merupakan pemicu bagi kemajuan UMKM dan peningkatan jumlah wirausaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, secara nasional terdapat lebih dari 56 juta wirausahawan. Jumlah wirau-

sahawan nasional, khususnya di sektor peternakan, dapat ditingkatkan mengacu momen Idul Kurban yang butuh hewan kurban berjumlah besar.

Pemerintah berperan strategis membangun ekonomi dengan memperkuat *networking* pelaku UMKM sekaligus kemudahan akses permodalan. Langkah ini untuk menopang fundamental ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi setiap krisis.

Dengan Idul Kurban, pemerintah bisa memetik hikmah ekonomi dengan mengembangkan jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jalinan kerja pemerintah semakin kuat dengan melibatkan akademisi dan pelaku usaha besar dan UMKM.

Daya tahan ekonomi nasional semakin kuat ditopang oleh kegiatan yang sebagian besar bertumpu pada kegiatan ekonomi dari dalam negeri. Pemerintah memiliki ruang lebih longgar untuk mewujudkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu hikmah Idul Kurban.

gam, bergizi, merata, serta lebih mudah diakses. Pangan yang disediakan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya agar masyarakat dapat menjalani hidup secara sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan.

Pemerintah berkewajiban memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan. Melalui Idul Kurban, pemerintah dapat momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional bertumpu pada usaha peternakan rakyat.

Pemerintah dapat pula menjadikan Idul Adha sebagai alat menjaga kondisi perekonomian menghadapi faktor eksternal, tekanan krisis global. Kondisi ekonomi nasional lebih kondusif didukung kemandirian usaha ternak rakyat menghasilkan hewan kurban.

Pasokan hewan kurban diperoleh secara mandiri. Sebaliknya, jika kebutuhan hewan kurban dipenuhi melalui impor, pemerintah tak bakal mampu membuat peternak nasional menikmati keuntungan dan lebih sejahtera.

Idul Kurban mendorong penguatan ketahanan pangan melalui tambahan *supply* daging bagi masyarakat khususnya kaum dhuafa. Meski bersifat temporer, daging kurban mampu meningkatkan konsumsi daging per kapita.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan, pada 2023, rerata konsumsi daging sapi segar oleh masyarakat 0,5 kilogram/kapita/tahun alias turun 9,1% dibanding 2022.

Konsumsi daging tersebut jauh dari ideal. Laporan World Cancer Research Fund menyebutkan, makan daging ideal sekitar 50-70 gram/hari atau 350-500 gram/minggu. Dibanding sejumlah negara tetangga di ASEAN, misalnya, Indonesia masih tertinggal.

Idul Kurban berhikmah meningkatkan kadar konsumsi daging. Namun, peningkatan ini harus berkelanjutan. Idul Kurban harus ditindaklanjuti oleh warga lebih beruntung, agar menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk warga kurang beruntung.


Tak sekadar spiritual, hikmah peringatan Hari Raya Idul Adha pun menyentuh aspek sosial dan ekonomi.



Ketahanan pangan

Merujuk UU 18/2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan pemenuhan pangan bagi negara hingga perseorangan. Ketahanan pangan dapat dicapai melalui ketersediaan pangan cukup, baik jumlah maupun mutu, dan aman.

Pemerintah harus mampu menyediakan pangan secara bera-

Title	Kondisi Pangan Strategis Kritis	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Jakarta Raya	
Page	6	
Author	Jr	

Kondisi Pangan Strategis Kritis

"El Nino belum berakhir tetapi musim kemarau sudah masuk. Puncaknya nanti kemarau adalah Agustus, September, Oktober. Kemudian November biasanya sudah ada hujan, nah 3 bulan ini lah sangat kritis karena juga ada El Nino,"

JAKARTA RAYA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan selama tiga bulan ini kondisi pangan strategis, seperti beras dan jagung, bakal masuk kondisi kritis. Itu terjadi lantaran musim kemarau akan tiba.

Sejauh ini, lanjut Amran, iklim cuaca kering El Nino belum selesai. Di perkiraan baru kelar pada bulan Juli hingga Agustus. Masalahnya, mulai Agustus Indonesia memasuki musim kemarau.

Sementara musim kemarau terjadi pada bulan Agustus, September, hingga Oktober. Tiga bulan ini lah yang disebut Amran sebagai masa kritis produksi pangan.

"El Nino belum berakhir tetapi musim kemarau sudah masuk. Puncaknya nanti ke-



Menteri Pertanian Amran Sulaiman

INDRAMAYUJIBH.COM

marau adalah Agustus, September, Oktober. Kemudian November biasanya sudah ada hujan, nah 3 bulan ini lah sangat kritis karena juga ada El Nino," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, dikutip Selasa (11/6).

Pun begitu, lanjut Amran,


pihaknya telah melakukan antisipasi kekeringan panjang. Salah satunya mengalihkan anggaran Rp 7 triliun untuk antisipasi kekeringan pada produksi pangan di Indonesia. Anggaran yang dialihkan ini diambil dari anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga anggaran pembangunan fa-

silitas Kementan.

Anggaran yang dialihkan ini akan digunakan untuk membiayai pembelian benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani-petani jagung dan beras sebagai pangan strategis.

"Kami laporkan pak, kami sudah refocusing anggaran untuk beli pompa, yang du-

lunya diperuntukkan untuk bangunan, diperuntukkan untuk sebagian perjalanan dinas, acara seminar, kemudian biaya tak penting dulu kami cabut kami refocusing kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani," ungkap Amran. (jr)

Title	Sapi Kurban Presiden Jokowi Seberat 1057 Ton Dikurbankan di Desa Ubung	 Kementerian Pertanian
Date	12 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 1	
Author	Ham	

Sapi Kurban Presiden Jokowi Seberat 1,057 Ton Dikurbankan di Desa Ubung

Mataram (Suara NTB) – Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kembali akan menyumbang hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah bagi warga di NTB. Pada tahun 2024 ini, sapi kurban Presiden Jokowi jenis Brahman Cross akan diserahkan pada jemaah Masjid Alifurrahmah Desa Ubung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB drh. Muslih dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/6), menjelaskan, sapi kurban seberat 1,057 ton tersebut dibeli dari seorang peternak di Lingkungan Menang Timur, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.


Menurutnya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya pembelian sapi kurban Presiden Jokowi dilakukan seleksi bersama dengan sapi dari peternak yang lain.

Bersambung ke hal 11



CEK - Tim Distan turun cek ternak hewan kurban di wilayah Gerung jelang hari Raya Idul Adha, kemarin. Diantara ternak kurban yang dicek, adalah sapi bantuan kemasyarakatan Presiden (Banpres) dari Presiden RI Joko Widodo untuk Lobar.

(Suara NTB/ist)

Title	Sapi Kurban Presiden Jokowi Seberat 1057 Ton Dikurbankan di Desa Ubung	
Date	12 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 2	
Author	Ham	

Sapi Kurban Presiden Jokowi Seberat 1,057 Ton Dikurbankan di Desa Ubung

Dari Hal. 1

Namun, pilihan sapi kurban presiden dibeli pada salah satu peternak di Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung.

Sapi hasil persilangan sapi jenis Brahman dan Simental ini sudah dipelihara selama 8 bulan di Lobar dan berumur 3,5 tahun. Sebelumnya, sapi ini dipelihara peternak di Kecamatan Gangga Kabupaten

Lombok Utara. Sapi ini, tampaknya, sudah layak untuk dikurbankan, karena telah melalui pemeriksaan kesehatan dan berat badan oleh Kementerian Pertanian dan Disnakeswan NTB.

Muslih menabahkan, sapi kurban dari Presiden Jokowi tahun 2024 ini lebih berat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi menyumbang sapi kurban seberat 1,04 ton.

Sapi kurban tersebut diserahkan untuk warga Dusun Rerot Timur Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat.

Satu ekor sapi kurban Presiden Jokowi tersebut dipilih dari 8 peternak di Pulau Lombok, yakni, peternak Desa Genggelang dan Gondang, Lombok Utara, peternak Desa Banyumulek Lombok Barat, peternak Desa Teratak Lombok Tengah dan 4 peternak

dari Lombok Timur, masing-masing berasal dari Desa Tirtanandi, Pringgasela Selatan dan Loyok. Dari 8 peternak tersebut, hanya dipilih satu ekor sapi dari peternak asal Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara dengan bobot 1,04 ton dibeli seharga Rp135 juta.

Disinggung mengenai pengawasan hewan kurban pada tahun 2024 ini, pihaknya menerjunkan sebanyak

160 petugas kesehatan hewan. Mereka nanti akan melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban, sehingga layak dikonsumsi.

“Pemeriksaan hewan kurban ada dua, sebelum dipotong dan sesudah dipotong. Kalau untuk hewan kurban tidak wajib dipotong di RPH tapi dalam pengawasan petugas. Supaya dagingnya aman, sehat, utuh dan halal,” ujarnya mengingatkan. **(ham)**

Title	Refocusing Anggaran Rp7 Triliun Bantun Petani Hadapi El Nino	
Date	12 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro/ant	

Refocusing Anggaran Rp7 Triliun Bantu Petani Hadapi El Nino

NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memfokuskan kembali atau refocusing anggaran senilai Rp7 triliun untuk membantu petani menghadapi El Nino dan kemarau atau kekeringan di tiga bulan masa kritis, pada periode Agustus, September dan Oktober.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai melaporkan kepada Presiden Jokowi hal-hal terkait pangan nasional, di Istana Kepresidenan Jakarta. "Kami sudah refocusing anggaran. Yang dulunya diperuntukkan untuk bangunan, diperuntukkan sebagian untuk perjalanan dinas, diperuntukkan untuk acara seminar, kemudian biaya yang tidak pent-

ing dulu, kami cabut, refocusing, kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani," kata Amran, mengutip laman Antara.


Amran mengatakan pihaknya akan fokus membantu memenuhi kebutuhan petani di tiga bulan masa kritis, agar produksi pertanian bisa naik. "Puncaknya kemarau nanti adalah Agustus, September, Oktober. Tiga bulan ini adalah sangat kritis. Kemudian November biasanya sudah ada hujan," katanya.

Menurut Amran, Presiden menginstruksikan agar refocusing anggaran dapat diselesaikan dalam waktu singkat untuk menghadapi musim kering ekstrem. Amran juga mengatakan solusi cepat untuk mengatasi kondisi El Nino

dan kekeringan adalah melalui "pompanisasi" atau menyalurkan air menggunakan pompa, dari sumber-sumber air ke lahan pertanian.

"Sekarang realisasi pompa sudah sekitar 70 persen. Masih ada (sisa) 30 persen. Mudah-mudahan ini kalau ini terpasang semua, akan ada 25.000 pompa, mudah-mudahan bisa memitigasi risiko kekeringan," ujarnya.

Menurut Amran, Presiden memerintahkan untuk segera menyelesaikan sisa 30 persen pengadaan pompa yang harus dipenuhi, sebelum Agustus 2024. "30 persen kami fokus Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kemudian Lampung, Sumsel, Sulsel, Kalsel, Kalteng. ●gro/ant

Title	Jelang Idul Adha, Stok Pangan Dipastikan Aman	
Date	12 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/ant	

Jelang Idul Adha, Stok Pangan Dipastikan Aman

NERACA

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan aman menjelang Idul Adha 1445 Hijriah pada 17 Juni 2024. Mentan menyampaikan kepastian itu sesuai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/6), untuk melaporkan kondisi pangan nasional saat ini, termasuk menjelang Idul Adha 2024. "Itu kami bicarakan tadi pangan, fokus pada pangan tetapi stoknya aman," ungkap Mentan.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, Mentan menjelaskan soal kondisi iklim di Tanah Air yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. "Sekarang posisi iklim El Nino masih berlangsung, mudah-mudahan Juli, Agustus, El Nino sudah selesai. Kemudian El Nino belum berakhir tetapi musim kemarau sudah masuk," ujar Mentan.

"Beliau tanyakan, bagaimana kemarau? 'Pak, puncaknya kemarau nanti adalah Agustus, September, Oktober. Kemudian November biasanya sudah ada hujan. Tiga bulan ini adalah sangat kritis,' lanjutnya. Untuk itu, ia pun mengatakan kepada Presiden bahwa solusi untuk memacu produksi pertanian di kala kondisi yang tidak menentu itu adalah melakukan pompanisasi.

"Kemudian diminta apa solusinya. Solusinya sudah kami lakukan sejak Maret. Solusi cepat untuk menangani kondisi El Nino dan kekeringan ini adalah pompanisasi. Pompanisasi ini kami laporkan, 'Pak, kami sudah *refocusing* anggaran untuk membeli pompa,' ungkap Mentan.

Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga memastikan i stok pangan nasional dalam kondisi yang aman dan terkendali menjelang Idul Adha 2024. "Berdasarkan proyeksi neraca pangan yang menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, secara umum stok pangan pokok strategis nasional, kami pastikan aman dan cukup, terutama mengantisipasi momentum Idul Adha yang sebentar lagi tiba," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Arief mengatakan bahwa telah menyampaikan hal tersebut dalam RDP bersama Komisi IV DPR-RI pada Senin (10/6) di Senayan, Jakarta. "Ada El Nino, La Nina atau apapun itu, Badan Pangan Nasional harus memas-

tikan bahwa stok pangan dalam kondisi yang aman," ucapnya. ● bari/ant